

**PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA, TINGKAT INFLASI, DAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH PADA KOTA BANDUNG PERIODE 2011-2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Sarjana Ekonomi  
Program Studi S1 Akuntansi

**GHINA UMNIATI  
NPM : C10160008**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS**

**BANDUNG**

**2020**

**PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA, TINGKAT INFLASI, DAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH PADA KOTA BANDUNG PERIODE 2011-2018**

**GHINA UMNIATI**

**NPM : C10160008**

Bandung, 10 Maret 2020

Pembimbing



**Dr. Hanifah, SE., Ak., M.Si., CA., QIA., CACP.**

Mengetahui,

Ketua STIE EKUITAS

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



**Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, CSP.**



**Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA.**

**Tanggung jawab yuridis ada pada penulis**

**PERNYATAAN**  
**PROGRAM SARJANA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 10 Maret 2020

Yang membuat pernyataan

**GHINA UMNIATI**

**C10160008**

**PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA, TINGKAT INFLASI, DAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH PADA KOTA BANDUNG PERIODE 2011-2018**

**Oleh :**

**Ghina Umniati**

**Pembimbing :**

**Dr. Hanifah, SE., Ak., M.si., CA., QIA., CACP**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menguji secara empiris mengenai pengaruh pendapatan per kapita, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah pada Kota Bandung periode 2011-2018 baik secara simultan maupun secara parsial.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan penelitian deskriptif dan verifikatif. Sampel dalam penelitian ini adalah pendapatan per kapita, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak daerah pada Kota Bandung periode 2011-2018. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji-t dan uji-F dengan bantuan *software* Eviews versi 9.

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, secara simultan pendapatan per kapita, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dengan nilai  $62,40398 > 2,93$  dengan tingkat signifikansi  $0,0000 < 0,05$ . Artinya secara bersama-sama pendapatan per kapita, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan. Sedangkan secara parsial, pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 85%, sedangkan 15% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

**Kata Kunci :** Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penerimaan Pajak Daerah.

**THE INFLUENCE OF PER CAPITA INCOME, INFLATION RATES,  
AND ECONOMIC GROWTH AGAINST LOCAL TAX REVENUE  
IN THE CITY OF BANDUNG PERIOD 2011-2018**

**By:**

**Ghina Umniati**

**Supervisor:**

**Dr. Hanifah, SE., Ak., M.si., CA., QIA., CACP**

**ABSTRACT**

*This research was conducted to determine and empirically test the effect of per capita income, inflation rates, and economic growth on local tax revenue in the city of Bandung for the period 2011-2018 both simultaneously and partially.*

*The method used in this study is a quantitative method using descriptive and verification research. The sample in this study is per capita income, inflation rate, economic growth and local tax revenue in the city of Bandung period 2011-2018. Data analysis techniques used multiple linear regression analysis and hypothesis testing using t-test and F-test with the help of software Eviews version 9.*

*Based on the results of data analysis and hypothesis testing, simultaneous per capita income, inflation rate, and economic growth have a significant effect with a value of  $62.40398 > 2.93$  with a significance level of  $0.0000 < 0.05$ . This means that together with per capita income, inflation rates and economic growth have a significant effect. While partially, per capita income has a significant effect on local tax revenue, the inflation rate has no significant effect on local tax revenue, and economic growth has a significant effect on regional tax revenue.*

*Local tax revenue is influenced by per capita income, inflation rate, and economic growth by 85%, while the remaining 15% is influenced by other factors not included in this study.*

**Keywords:** *Per Capita Income, Inflation Rates, Economic Growth, and Local Tax Revenue.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA, serta senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan dan dorongan semangat dalam hati sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018”**.

Dalam mempersiapkan dan menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membimbing dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, ungkapan terima kasih yang tak pernah putus penulis ungkapan untuk semua pihak, diantaranya:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Drs. Hery Krisnawan, MM. dan Ibu Nurhayati A.md.Keb. yang telah memberikan dukungan materil dan moril serta menjadi penyemangat tanpa adanya kata lelah yang tidak ternilai demi kelancaran dan keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT memberikan seluruh kebaikan dan kebahagiaan bagi mereka.
2. Bapak Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, CSP, selaku Ketua STIE EKUITAS.
3. Ibu Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi SI Akuntansi STIE Ekuitas.

4. Bapak Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung.
5. Ibu Dr. Erlynda Y. Kasim, SE., M.Si., Ak., CA., CSP. selaku Dosen Wali Akuntansi 1 yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan selama menempuh perkuliahan di STIE EKUITAS Bandung.
6. Ibu Dr. Hanifah SE., Ak., M.si., CA., QIA., CACP. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, memberikan pengarahan dan memberikan masukan hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Yuyus Yudistria, SE., ME., selaku Penguji Sidang Skripsi.
8. Ibu Nurul Fatimah, S.Pd., M.Si., selaku Penguji Komprehensif.
9. Seluruh Staf Dosen Pengajar STIE Ekuitas yang telah memberikan ilmu akademik dan pengetahuan selama dibangku kuliah.
10. Seluruh Staf BAAK, BAU dan Perpustakaan yang telah membantu dalam bidang administrasi.
11. Refki Hafidz Dwi Putra yang selalu memberikan dukungan, semangat , doa dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
12. Kepada teman-temanku, Herlina, Nurul Hanissa, Endang Firdayanti, Rika Anggia, Nurfatma Devi, Anies Nur Fadhilah, Femi Rieskiazmi, Junaeni, Tuslykha Burhan, Ila Casnila, Khosiyatun Annisa dan teman-teman lain yang telah membantu penelitian ini dan memberikan semangat.
13. Kepada teman-teman satu bimbingan yakni Herlina, Nurul Hanissa, Rika Anggia, Galuh Wigati, Eriyatun, Mirza, Zulfikar, Jesi, dan teman-teman lain yang telah membantu penelitian ini dan memberikan semangat.

14. Teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Ekuitas Indramayu (IMEI) yakni Sodikin, Ghyna Rosdyana, Reffy Dwi Mahdi, Sherly Afri Antony, Intan Rosca Carolina, Ayu Widyawati, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat.
15. Seluruh rekan-rekan jurusan S1 Akuntansi STIE Ekuitas.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih dan berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

*Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barrakatuh*

Bandung, Maret 2020

Ghina Umniati

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### LEMBAR PERNYATAAN

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.5. Waktu dan Tempat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN</b>	
<b>HIPOTESIS PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
2.1. Tinjauan Pustaka .....	12
2.1.1. Pajak .....	12
2.1.1.1. Pengertian Pajak .....	12
2.1.1.2. Jenis Pajak .....	14
2.1.1.3. Fungsi Pajak.....	15

2.1.1.4.	Unsur-unsur Pajak.....	17
2.1.1.5.	Sistem Pemungutan Pajak .....	17
2.1.1.6.	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	18
2.1.1.7.	Tarif Pajak .....	19
2.1.2.	Pendapatan Per Kapita .....	15
2.1.2.1.	Pengertian Pendapatan Per Kapita.....	15
2.1.2.2.	Cara Perhitungan PDRB .....	20
2.1.2.3.	Indikator Pendapatan Per Kapita .....	22
2.1.3.	Tingkat Inflasi .....	22
2.1.3.1.	Pengertian Inflasi .....	22
2.1.3.2.	Indikator Tingkat Inflasi .....	23
2.1.3.3.	Jenis Inflasi .....	23
2.1.4.	Pertumbuhan Ekonomi .....	25
2.1.4.1.	Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	25
2.1.4.2.	Indikator Pertumbuhan Ekonomi.....	25
2.1.4.3.	Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi.....	26
2.1.5.	Penerimaan Pajak Daerah .....	28
2.1.5.1.	Pengertian Pajak Daerah.....	28
2.1.5.2.	Jenis Pajak Daerah.....	29
2.1.5.3.	Tarif Pajak Daerah.....	30
2.1.5.4.	Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.....	32
2.1.6.	Penelitian Terdahulu .....	33
2.2.	Kerangka Pemikiran .....	40

2.2.1. Pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	41
2.2.2. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	42
2.2.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	43
2.3. Hipotesis Penelitian .....	46
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
3.1. Objek Penelitian .....	47
3.1.1. Gambaran Umum Kota Bandung .....	47
3.1.1.1. Sejarah Kota Bandung .....	51
3.1.1.2. Lambang Kota Bandung .....	53
3.1.1.3. Visi dan Misi Kota Bandung .....	55
3.2. Metode Penelitian .....	57
3.2.1. Desain Penelitian .....	57
3.2.2. Operasional Variabel Penelitian.....	59
3.2.3. Populasi dan Sampel.....	61
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data .....	62
3.2.5. Rancangan Pengujian Hipotesis .....	62
3.2.5.1. Analisis Deskriptif .....	64
3.2.5.2. Analisis Verifikatif .....	64
3.2.5.3. Uji Asumsi Klasik .....	64
3.2.5.4. Analisis Regresi Linear Berganda .....	68
3.2.5.5. Pengujian Hipotesis .....	69



4.2. Pembahasan .....	94
4.2.1. Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011- 2018.....	94
4.2.1.1. Pendapatan Per Kapita Pada Kota Bandung Periode 2011- 2018.....	94
4.2.1.2. Tingkat Inflasi Pada Kota Bandung Periode 2011- 2018.....	95
4.2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Pada Kota Bandung Periode 2011- 2018.....	96
4.2.1.4. Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011- 2018.....	97
4.2.2. Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Secara Parsial Pada Kota Bandung Periode 2011-2018 .....	99
4.2.2.1. Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	99
4.2.2.2. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	100
4.2.2.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	102
4.2.3. Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Secara Simultan Pada Kota Bandung Periode 2011-2018 .....	105

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>106</b>
5.1. Kesimpulan .....	106
5.2. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah .....	4
2.1	Tabel Penelitian Terdahulu .....	33
3.1	Tabel Operasional Variabel.....	60
4.1	Tabel Pendapatan Per Kapita Kota Bandung Periode 2011-2018 .....	72
4.2	Tabel Tingkat Inflasi Kota Bandung Periode 2011-2018 .....	75
4.3	Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Periode 2011-2018.....	77
4.4	Tabel Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018.....	79
4.5	Tabel Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	81
4.6	Tabel Uji Multikolinearitas .....	84
4.7	Tabel Uji Heterokedastisitas .....	85
4.8	Tabel Uji Autokorelasi .....	86
4.9	Tabel Analisis Regresi Linear Berganda.....	87
4.10	Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah....	89
4.11	Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	90
4.12	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah ...	91
4.13	Tabel Uji F (Uji Simultan) .....	92
4.14	Tabel Koefisien Determinasi.....	93

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran .....	45
2.2 Paradigma Penelitian.....	46
3.1 Peta Kota Bandung .....	51
3.2 Lambang Kota Bandung .....	53
4.1 Grafik Pendapatan Per Kapita Kota Bandung Periode 2011-2018 .....	73
4.2 Grafik Tingkat Inflasi Kota Bandung Periode 2011-2018.....	75
4.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Periode 2011-2018.....	78
4.4 Grafik Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018 .....	80
4.5 Uji Normalitas .....	83

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : *Photocopy* SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2** : *Photocopy* Kartu Bimbingan
- Lampiran 3** : *Photocopy* Formulir Pengajuan Judul Penulisan Skripsi
- Lampiran 4** : *Photocopy* Surat Permohonan Perubahan Topik/Judul Skripsi
- Lampiran 5** : Data Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan  
Ekonomi pada Kota Bandung periode 2011-2018
- Lampiran 6** : Hasil Pengolahan Data (*Microsoft Excel*)
- Lampiran 7** : Perhitungan Statistik Dengan Menggunakan *Software E-views v9*
- Lampiran 8** : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap Daerah di Indonesia untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Kebijakan desentralisasi digunakan sebagai upaya efisiensi untuk mempermudah tugas pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang dituangkan melalui kebijakan Otonomi Daerah. Dimana setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota tentunya memiliki hak dan wewenang untuk mengatur pemerintahan serta mengelola keuangan rumah tangganya sendiri guna mencapai kesejahteraan masyarakat pada daerah provinsi, kabupaten dan kota tersebut.

Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut, telah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan cara memperluas basis pajak daerah serta memberikan kewenangan pada kepala daerah terkait dengan penetapan tarif. Tarif yang kemudian ditentukan oleh kepala daerah ini harus dapat mengoptimalkan serta menyesuaikan dengan target penerimaan daerah tersebut.

Kebijakan otonomi daerah pelaksanaannya dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota yang diawali dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam proses desentralisasi ini harus disertai dengan penyerahan serta pengalihan pembiayaan. Pada Kabupaten atau Kota sebagai daerah-daerah otonom yang berada di Provinsi Jawa Barat, dituntut untuk mampu membiayai pengeluarannya dari sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan diberikan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya.

Sumber pembiayaan yang paling penting dan utama adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan sebutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diketahui komponen utamanya yaitu penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dinas-dinas dan pendapatan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan murni daerah.

Penerimaan pajak adalah komponen utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah serta pembangunan daerah. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperbaiki sarana dan prasarana publik seperti halte bus, moda angkutan umum, jalan raya, lampu penerangan jalan raya dan penerangan ruang publik, serta lainnya yang dapat menunjang kehidupan masyarakat umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah memiliki wewenang untuk menggali sumber dana sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga kedepannya kebijakan tersebut dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar termasuk bagi Penerimaan Daerah Kota Bandung. Dasar normatif dalam pengelolaan pajak daerah yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan pajak daerah melalui pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan hasil pungutan daerah. Untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Bandung kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai 9 (Sembilan) jenis pajak meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Parkir
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Pajak Reklame
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

**Tabel 1.1**

**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung**

**Tahun 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>2014</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	<b>1.399.598.856.917</b>	<b>99,97</b>
<b>2015</b>	<b>1.598.000.000.000</b>	<b>1.494.147.377.053</b>	<b>93,50</b>
<b>2016</b>	<b>2.186.416.770.000</b>	<b>1.709.807.582.556</b>	<b>78,20</b>
<b>2017</b>	<b>2.400.097.139.060</b>	<b>2.176.900.150.574</b>	<b>90,62</b>

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Dalam tabel 1.1, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung selalu tidak berhasil mencapai target. Pada tahun 2014,2015,2016 dan 2017 penerimaan Pajak daerah Kota Bandung tetap tidak berhasil mencapai target, begitupula pada tahun-tahun sebelumnya meskipun pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, sangat disayangkan karena masih terdapat banyak potensi yang dapat dimaksimalkan seperti Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang memiliki selisih target dan potensi paling besar di antara sembilan jenis pajak yang ada. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memasang target pemasukan pajak BPHTB 2015 sebesar Rp 488 miliar, sedangkan potensinya mencapai Rp 631 miliar dan semua pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai subjek dan objek pajak telah terdaftar sebagai wajib pajak daerah. ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), di akses Rabu, 18 September 2019). Potensi pajak

yang dapat dimaksimalkan lainnya adalah Pajak Reklame. Seperti yang dikatakan oleh Ema Sumarna selaku Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung. Ia menyatakan bahwa target penerimaan pajak tahun 2017 tidak tercapai. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak tercapainya pajak reklame dari target Rp 241 miliar hanya terealisasi Rp 12,8 miliar. (<https://news.detik.com>, di akses Kamis 19 September 2019).

Pajak pada dasarnya memang bersifat dinamis dimana pajak akan selalu mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga dituntut untuk menghasilkan peningkatan dalam penerimaan dan perubahan dalam segala aspek perpajakan. Terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahunnya berpotensi untuk menerima pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan pajak yang lebih tinggi sehingga diperlukan suatu metode atau cara untuk dapat memanfaatkan secara optimal potensi tersebut.

Wali Kota Bandung pada saat itu, Ridwan Kamil mengoptimalkan pendapatan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal melalui Program Penindakan dan Penertiban Pajak Daerah (P4D). Dengan adanya program ini, Pemkot Bandung bisa mengetahui siapa saja wajib pajak (WP) dan Objek Pajak (OP), yang belum memiliki NPWP. (<http://ayobandung.com>, di akses Jumat, 20 September 2019). Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga tengah melakukan optimalisasi Penerimaan Pajak dengan cara mengejar tambahan pendapatan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak sewa kos-kosan. Sebab, di Kota Bandung, banyak persewaan kamar kos-kosan, terutama di sekitar kawasan pendidikan. Pada 2019, Pemkot Bandung menargetkan meraih pajak sebesar 2,56 triliun rupiah. (<http://www.koran-jakarta.com>, di akses Kamis 19 September 2019).

Tingkat kesejahteraan pada suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan rata-rata masyarakat pada daerah tersebut atau dapat diartikan jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap masyarakat suatu negara pada periode tertentu. Menurut Sukirno (2015: 424) Pendapatan Per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu pendapatan perkapita yang digambarkan dengan PDRB per kapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan ekonomi yang menunjukkan semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin sejahtera penduduk yang berada di wilayah tersebut. Keterkaitan antara Penerimaan Pajak Daerah dengan PDRB per kapita juga sangat besar karena apabila PDRB per kapita semakin besar, maka semakin besar juga potensi Penerimaan Daerah tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita Suci Arianto yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya menyimpulkan bahwa dengan meningkatnya PDRB maka akan semakin tinggi pula ekonomi daerah tersebut dan bisa membayar pajak dengan tertib juga memungkinkan daerah untuk menarik pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hariyuda (2009) menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Terjadinya peningkatan inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan tersebut dapat bersifat menguntungkan ataupun merugikan. Pada beberapa kondisi (inflasi lunak), inflasi dapat berdampak baik pada perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha untuk memperluas produksinya. Dengan demikian, kesempatan kerja yang tersedia akan semakin luas sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Tetapi, bagi masyarakat yang berpenghasilan

tetap, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka karena penghasilan yang tetap itu jika ditukarkan dengan barang dan jasa akan semakin berkurang. Menurut Hera Susanti, Moh Ikhsan dan Widyanti (2007: 38) inflasi di definisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dan per sistem dari suatu perekonomian. Inflasi tentu berperan penting dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah serta masyarakat dapat berperan serta untuk mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja yang baru serta merangsang kegiatan perkembangan ekonomi di daerah tersebut (Arsyad, 2010). Adanya pembentukan institusi-institusi baru, menjadi alternatif perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik. Dengan adanya perbaikan tersebut, akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga lebih meningkat daripada sebelumnya. Menurut Sukirno (2015: 9) pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Menurut Hera Susanti, Moh Ikhsan dan Widyanti (2007: 21) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sedangkan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi per provinsi yaitu tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB suatu daerah meningkat, berarti kemampuan daerah dalam membayar pajak juga ikut meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan pajak dalam daerah tersebut juga akan semakin besar (Masrofi, 2004). Dari hal tersebut dapat

disimpulkan bahwa apabila perekonomian daerah berjalan dengan baik, maka pendapatan per kapita pada suatu daerah tersebut akan semakin baik pula, begitupun dengan penerimaan pajak daerah tersebut.

Target pajak ditetapkan berdasarkan beberapa indikator dalam kegiatan perekonomian. Seperti yang dikatakan dalam sebuah artikel bahwa indikator ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi memegang peranan penting dalam menghasilkan formula penetapan target pajak (<http://www.pajak.go.id/>, di akses Senin, 9 September 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Dian Triastuti dan Dudi Pratomo yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal/Pembangunan dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014) menghasilkan penelitian bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Puspa Suci Arianto yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya menghasilkan penelitian bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah. Inflasi tidak berpengaruh signifikan dan juga berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah. PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika sektor pembentuk PDRB naik, maka penerimaan pajak daerah pun akan naik.

Selain penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Pidelis Murib,dkk dengan judul Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013 menyatakan hasil yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, jumlah

perusahaan, dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD tahun 2004-2013 (Pendapatan Asli Daerah). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Herwig Immervoll dengan judul *The Impact of Inflation on Income Tax and Social Insurance Contributions in Europe*, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kanghua Zeng, *et all* dengan judul *The Impact of Economic Growth and Tax Reform on Tax Revenue and Structure: Evidence from China Experience*, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak signifikan terhadap total penerimaan pajak dan perubahan struktur, namun juga memiliki hubungan stabilitas jangka panjang dengan total penerimaan pajak,, tidak ada pertumbuhan penerimaan pajak yang luar biasa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, didapatkan fenomena yang terjadi antara Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Daerah pada Kota Bandung serta terdapat beberapa penelitian sebelumnya tetapi masih menggunakan data yang terdahulu dan bukan berdasarkan data terkini, baik itu dilakukan di Kota Bandung ataupun Kota lainnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018?
2. Bagaimana Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018?
3. Bagaimana Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta memperoleh informasi mengenai pengaruh dari Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018.

2. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018 secara parsial.
3. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018 secara simultan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Kegunaan Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai apakah Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

2. Kegunaan Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan dalam mengevaluasi Penerimaan Pajak Daerah, meningkatkan pengelolaan Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi serta Pertumbuhan Ekonomi, dan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kota Bandung.

3. Kegunaan Bagi Akademisi

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

- 2) Digunakan untuk memperkaya pengetahuan dan sumber informasi di bidang perpajakan untuk para insan pendidikan dan masyarakat.

### **1.5 Waktu dan Tempat Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini, peneliti melakukan penelitian pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berada di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung. Dengan memperoleh data melalui website [bppd.bandung.go.id](http://bppd.bandung.go.id) dan [bandungkota.bps.go.id](http://bandungkota.bps.go.id). Peneliti berharap dengan tempat penelitian yang telah dipilih, dapat membantu menyelesaikan proses penelitian ini. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan selesai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **PENELITIAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Beberapa ahli mendefinisikan pajak berdasarkan berbagai sudut pandang yang berbeda dimana definisi para ahli tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Mardiasmo (2018:1) pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Resmi (2016:1) menyatakan pajak adalah :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dari berbagai pengertian pajak menurut para ahli diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung serta bersifat memaksa yang timbal baliknya tidak dapat diberikan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan terkait pembangunan daerah maupun Negara.

### **2.1.1.2 Jenis Pajak**

Pajak terdiri dari beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia. Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

#### **1. Menurut Golongan**

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

- a. Pajak langsung (*Direct Tax*), pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak tidak langsung (*Indirect Tax*), pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang/jasa.

#### **2. Menurut Sifat**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

#### **2.1.1.3 Fungsi Pajak**

Pajak merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan. Pajak menjadi sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh keperluan dan pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk kebutuhan pembangunan. Menurut Resmi (2017:3), pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

##### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh melalui cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan

pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan sebagainya.

## 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur, antara lain :

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

#### **2.1.1.4 Unsur-Unsur Pajak**

Pajak memiliki beberapa unsur-unsur di dalamnya. Menurut Mardiasmo (2018:1) pajak memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kotraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran - pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:9) sistem pemungutan pajak terdiri dari beberapa sistem, yaitu sebagai berikut :

##### *1. Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### **2.1.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:8) pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Stelsel Nyata (*Riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

## 2. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

## 3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

### **2.1.1.7 Tarif Pajak**

Terdapat beberapa tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2018:7) tarif pajak terdiri dari 4 macam, yaitu :

1. Tarif Sebanding/Proporsional, merupakan tarif yang berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap, merupakan tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif, merupakan presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah pajak yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif Degresif, merupakan presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar.

## **2.1.2 Pendapatan Per Kapita**

### **2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Per Kapita**

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu (Sukirno, 2015:424). Menurut Murni (2016:192) pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator yang telah lama digunakan dalam makro-ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hera Susanti, Moh Ikhsan dan Widyanti (2007:61) menyatakan bahwa semakin maju suatu perekonomian maka semakin tingginya pendapatan perkapita penduduknya. Implikasinya, semakin tinggi pula daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, termasuk pajak daerah.

### **2.1.2.2 Cara Perhitungan PDRB**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat tiga cara perhitungan PDRB yang dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut :

## **1. Pendekatan Produksi**

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya terdiri dari sembilan sektor lapangan usaha yaitu sebagai berikut :

- a. Pertanian
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Listrik, gas, dan air bersih
- e. Bangunan dan Konstruksi
- f. Perdagangan, hotel dan restoran
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan
- i. Jasa-jasa lainnya

## **2. Pendekatan Pengeluaran**

PDRB menurut pendekatan pengeluaran yaitu penjumlahan semua komponen permintaan akhir dari :

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)
- b. Konsumsi pemerintah
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)
- d. Pembentukan stok
- e. Ekspor netto (ekspor dikurang impor)

### 3. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga penghasilan dan pajak langsung lainnya.

#### 2.1.2.3 Indikator Pendapatan Per Kapita

Menurut Sukirno (2015:424) salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan penghitungannya adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Dengan demikian pendapatan per kapita suatu daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Keterangan :

PDRB Per Kapita = Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

#### 2.1.3 Tingkat Inflasi

##### 2.1.3.1 Pengertian Inflasi

Menurut Murni (2016:218) inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Tingkat inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga-harga di pasaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apabila kenaikan harga yang terjadi tidak

berlangsung secara terus menerus atau hanya bersifat sementara, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan inflasi.

### 2.1.3.2 Indikator Tingkat Inflasi

Indikator tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perkembangan laju inflasi pada Kota Bandung tahun 2011-2018. Menurut Sukirno (2015:20) tingkat inflasi terutama dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya. Untuk menentukannya perlu diperhatikan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen dari suatu tahun tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada tahun sebelumnya. Tingkat inflasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{IH_t - IH_{t-1}}{IH_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

IH<sub>t</sub> = Indeks Harga Tahun t

IH<sub>t-1</sub> = Indeks Harga Tahun sebelumnya

### 2.1.3.3 Jenis Inflasi

Inflasi tergolong kedalam beberapa jenis, adapun menurut Murni (2016:219) jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan pada tingkat laju inflasi dan berdasarkan pada sumber atau penyebab inflasi yaitu sebagai berikut :

#### 1. Berdasarkan Tingkat/Laju Inflasi

- a. *Moderat Inflation* (laju inflasinya antara 7-10%) adalah inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat.

- b. *Galloping Inflation* adalah inflasi ganas (tingkat laju inflasinya antara 20-100%) yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius terhadap perekonomian dan timbulnya distorsi-distorsi besar dalam perekonomian.
- c. *Hyper Inflation* adalah inflasi yang tingkat laju inflasinya sangat tinggi (di atas 100%). Inflasi ini sangat mematikan kegiatan perekonomian masyarakat.

## 2. Berdasarkan Sumber atau Penyebab Inflasi

- a. Demand Full Inflation, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian sedang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya daya beli yang sangat tinggi. Daya beli yang tinggi akan mendorong permintaan melebihi total produk yang tersedia. Permintaan *aggregate* meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, akibatnya timbul inflasi.
- b. Cost Push Inflation, inflasi ini terjadi bila biaya produksi mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga *input* seperti kenaikan upah minimum, kenaikan bahan baku, kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, dan kenaikan-kenaikan *input* lainnya yang mungkin semakin langka dan harus diimpor dari luar negeri.
- c. Imported Inflation, inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor, terutama barang yang diimpor tersebut mempunyai peranan penting dalam setiap kegiatan produksi.

## 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

### 2.1.4.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2015:9) Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai : perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara (Sukirno, 2015:423). Menurut Murni (2016:184) pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan *output per capita* dan meningkatnya standar hidup masyarakat.

### 2.1.4.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Murni (2016:39) laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atau *Rate of Economic Growth* adalah suatu angka dalam presentase yang memperlihatkan tinggi rendahnya atau cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam satu tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB<sub>t</sub> = Produk Domestik Regional Bruto tahun t

PDRB<sub>t-1</sub> = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

Terdapat berbagai sumber atau indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang dikemukakan oleh para ahli, walaupun terdapat sedikit perbedaan tetapi hal tersebut seiring dengan maksud dan tujuan yang sama. Menurut Hera Susanti, Moh Ikhsan dan Widyanti (2007: 21) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
- 2) Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi per provinsi yaitu tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

#### **2.1.4.3 Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Murni (2016:189) pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Konsep-konsep dasar ekonomi mikro dalam teori produksi dapat dijadikan landasan untuk melihat faktor-faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi. Adapun maksud dari faktor-faktor (input-input) yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu :

##### **1. Sumber Daya Manusia**

*Input* tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan angkatan kerja. Banyak ekonom meyakini bahwa kualitas *input* tenaga kerja yaitu keterampilan, pengetahuan, dan disiplin adalah satu-satunya unsur penting dari pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi dalam kegiatan perekonomian sangat menuntut ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan terampil. Misalnya, perkembangan teknologi informasi harus didukung oleh tenaga kerja yang terlatih dan terampil di bidang computer.

## 2. Sumber Daya Alam

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan, hasil laut, serta jumlah dan hasil kekayaan tambang. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan proses pertumbuhan ekonomi.

## 3. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal ada yang disebut barang modal, dan ada pula yang disebut modal. Negara-negara yang tumbuh pesat cenderung melakukan investasi sangat besar dalam pembentukan barang modal baru. Upaya berinvestasi bertujuan untuk meningkatkan social overhead capital seperti membangun jalan, irigasi, sarana, dan prasarana lainnya. Setelah itu terbukti bahwa peningkatan social overhead capital sangat dibutuhkan untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

## 4. Teknologi dan Inovasi

Kemajuan ekonomi yang berlaku di berbagai negara secara umum ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi. Efek yang utama yaitu :

- a. Dapat mempertinggi efisiensi dalam kegiatan produksi
- b. Menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya
- c. Meninggikan mutu barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harga

## **2.1.5 Penerimaan Pajak Daerah**

### **2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah**

Terdapat berbagai pemahaman tentang definisi pajak daerah di Indonesia. Ada beberapa ahli dan juga ada Undang-Undang yang memuat pengertian pajak daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 yaitu:

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah :

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang digunakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Sedangkan Pengertian pajak daerah menurut Siahaan (2010:7) yaitu :

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Dari berbagai pengertian pajak menurut para ahli diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayar oleh rakyat untuk daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang timbal baliknya tidak dapat diberikan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan keperluan daerah untuk kepentingan serta kemakmuran rakyat. Dari kesimpulan tersebut, dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi rakyat kepada pemerintah daerah untuk membantu penyelenggaraan kegiatan,

pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta kepentingan lainnya yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan dan kemakmuran rakyat.

#### **2.1.5.2 Jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kegiatan yang dilakukan pada bidang-bidang tertentu. Adapun jenis pajak daerah yang dapat dipungut di Kota Bandung menurut Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 Pasal 2 yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
2. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan kendaraan bermotor.
7. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

### 2.1.5.3 Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:15) tarif pajak daerah terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
  - b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintan Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
  - a. Penyerahan pertama sebesar 20% ; dan
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% .
5. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% ; dan
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.
6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
  7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
  8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%.
  9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
  10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
  11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
  12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
  13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
  14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
  15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.
  16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
  17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
  18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0.3%.
  19. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

#### **2.1.5.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 96 menetapkan tata cara pemungutan Pajak Daerah untuk setiap Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan
2. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud diatas berupa karcis dan nota perhitungan
5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Menurut Frangky Martinus Mea, Vicky V. J. Panelewen Arie D. P. Mirah (2017) indikator yang digunakan untuk kegiatan penerimaan pajak daerah yaitu sebagai berikut :

##### 1) Pertumbuhan

Pertumbuhan penerimaan daerah merupakan indikator untuk melihat sejauh mana perkembangan suatu ayat penerimaan dari tahun ketahun.

##### 2) Kontribusi/Proporsi

Kontribusi/proporsi dari ayat penerimaan daerah merupakan sumbangan yang diukur dalam bentuk prosentase suatu ayat penerimaan terhadap total ayat penerimaan (pajak).

### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai keterkaitan pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah, penulis ungkapkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan
1	Kanghua Zeng, Shan Li, Qian Li (2014)	<i>The impact of economic growth and tax reform on tax revenue and structure : evidence from China Experience</i>	Variabel Independen (X) : <i>Economic Growth, Tax Reform</i>  Variabel Dependen (Y) : <i>Tax Revenue and Structure</i>	Pertumbuhan ekonomi dan reformasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan struktur pajak. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap total penerimaan pajak dan struktur pajak dalam jangka pendek.	Penelitian yang dilakukan oleh Khanghua Zeng, Shan Li, Qian Li pada tahun 2014 di China memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen.

2	Herwig Immervoll (2000)	<i>The Impact of Inflation on Income Tax and Social Insurance Contributions in Europe</i>	Variabel Independen (X) : <i>Inflation</i>  Variabel Dependen (Y) : <i>Income Tax and Social Insurance Contributions</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan penerimaan kontribusi asuransi sosial.	Penelitian yang dilakukan oleh Herwig Immervoll memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan variabel inflasi sebagai variabel independen.
3	Abolfazl Yahyaabadi, Farzad Karimi, dan Nahid Abedini Najafabadi (2012)	<i>An investigation on economic growth and tax: A case study of D8 countries from 1990 to 2009</i>	Variabel Independen (X) : <i>Economic Growth, Tax</i>  Variabel Dependen (Y) : <i>Investigation</i>	Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap investigasi penerimaan pajak.	Penelitian yang dilakukan oleh Abolfazl Yahyaabadi, dkk memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen.

4	Oktiya Damayanti Suhadak, Maria Goretti Wi, Endang Nirowati Pamungkas (2016)	Pengaruh Tingkat Inflasi, <i>Economic Growth</i> , Dan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara-Negara Asia (Studi Pada World Bank Periode 2005-2014)	Variabel Independen (X) : Tingkat Inflasi, <i>Economic Growth</i> , Tarif Pajak Variabel Dependen (Y) : Penerimaan Pajak Di Negara-Negara Asia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat inflasi, <i>Economic Growth</i> dan Tarif Pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia (H2 diterima).	Penelitian yang dilakukan oleh Oktiya Damayanti Suhadak, dkk memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan variabel tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen.
5	Pidelis Murib, Debby C. Rotinsulu, Dan Krest D. Tolosang (2016)	Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten	Variabel Independen (X) : Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan, Jumlah Penduduk	Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan perkapita, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan	Penelitian yang dilakukan oleh Pidelis Murib, dkk memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan variabel pendapatan per

		Nabire Papua Tahun 2004-2013	Variabel Dependen (Y) : Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire Papua (y)	terhadap PAD di Kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013	kapita sebagai variabel independen.
6	Suci Sukmawati (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Medan	Variabel Independen (X) : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Pelanggan Listrik, dan Inflasi.  Variabel Dependen (Y) : Penerimaan Pajak Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB, jumlah pelanggan listrik dan inflasi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Medan.	Penelitian Suci Sukmawati memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan variabel pendapatan per kapita atau PDRB dan inflasi sebagai variabel independen dan variabel penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen.

7	Puspita Suci Arianto (2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya	Variabel Independen (X) : Jumlah Penduduk, Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  Variabel Dependen (Y) : Penerimaan Pajak Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk, Inflasi, PDRB, secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya.	Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Suci Arianto memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan variabel pendapatan per kapita atau PDRB dan inflasi sebagai variabel independen dan variabel penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen.
8	Hidayati Sania, Eva Anggra Yunita, Ibnu Muttaqin (2018)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi	Variabel Independen (X) : Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional	Hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi secara simultan	Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati Sania, dkk memiliki persamaan dengan penelitian

		Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	Bruto, Inflasi Variabel Dependen (Y) : Penerimaan Pajak Daerah	memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak daerah.	penulis yaitu menggunakan variabel pendapatan per kapita atau PDRB dan inflasi sebagai variabel independen dan variabel penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen.
9	Dian Triastuti, Dudi Pratomo (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah	Variabel Independen (X) : Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, Tingkat Inflasi Variabel Dependen (Y) : Penerimaan Pajak Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung	Penelitian yang dilakukan oleh Dian Triastuti, Dudi Pratomo memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai variabel

		Kota Bandung Periode 2007-2014)		tahun 2007-2014.	independen dan variabel penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen.
10	Encep Herdiana Rachman Nalendra (2013)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2012)	Variabel Independen (X) : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi  Variabel Dependen (Y) : Penerimaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pada Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2012	Penelitian yang dilakukan oleh Encep Herdiana Rachman Nalendra memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan variabel PDRB dan tingkat inflasi sebagai variabel independen dan variabel penerimaan pajak sebagai variabel dependen.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah suatu organisasi Dinas Daerah Kota Bandung yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung bertugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pajak daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pajak daerah yang merupakan sebagian kewenangan daerah kota Bandung.

Menurut Mardiasmo (2018:12) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan ditetapkannya otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pajak daerahnya masing-masing sebagai salah satu komponen utama yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah yang bersangkutan.

Penerimaan pajak pada suatu daerah tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mardiasmo dan Makhfatih (2000:8) menyebutkan bahwa untuk melihat potensi penerimaan suatu daerah, dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan berbeda variabel ekonomi dan variabel non ekonomi. Variabel-variabel tersebut antara lain keadaan struktur ekonomi, jumlah penduduk, PDRB perkapita rill, tingkat inflasi, peningkatan cakupan penerimaan daerah, penyesuaian tarif, pengembangan baru, sumber pendapatan baru dan peraturan baru.

### **2.2.1 Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Menurut Murni (2016:192) pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif sisi makroekonomi, indikator merupakan bagian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pada suatu daerah. Pendapatan per kapita merupakan salah satu alat ukur terhadap suatu pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah maupun negara. Sedangkan menurut Sukirno (2015:34) produk domestik bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam negara tersebut dalam tahun tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Suci Arianto (2014) menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk, Inflasi, PDRB, secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya. Semakin meningkatnya pendapatan per kapita atau PDRB, maka kemampuan masyarakat memenuhi kewajibannya pun ikut meningkat termasuk kewajiban membayar pajak daerah.

Hasil penelitian Abolfazl Yahyaabadi , Farzad Karimi, and Nahid Abedini Najafabadi (2012) menunjukkan pertumbuhan produk domestik adalah yang paling penting faktor dan pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak pajak ketika angka pertumbuhan ekonomi membaik, produk domestik bruto atau pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak nrgara. Peningkatan 1% pada PDB akan meningkatkan pendapatan kena pajak sekitar 0,0014119%. Penghasilan kena pajak akan meningkat sekitar 10.26257 unit. Satu yang bertentangan dengan variabel lain, pengangguran memiliki dampak negatif pada pendapatan kena pajak.

Penelitian Pidelis Murib, Debby C. Rotinsulu, Dan Krest D. Tolosang (2016) menunjukkan bahwa Pendapatan per kapita, jumlah perusahaan, dan jumlah

penduduk memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap PAD di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013. Pendapatan koefisien determinasi berganda diperoleh pendaftaran sebesar 0,984, yang artinya model yang digunakan dalam hal ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya dapat menjelaskan variabel dependen pada 98,4%, sedangkan sisanya 1,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian tersebut.

### **2.2.2 Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Tingkat inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga-harga di pasaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apabila kenaikan harga yang terjadi tidak berlangsung secara terus menerus atau hanya bersifat sementara, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan inflasi. Pada dasarnya kenaikan harga merupakan hal yang wajar dan memang lazim terjadi, karena dengan adanya kenaikan harga, maka suatu daerah dapat mengalami proses pertumbuhan ekonomi. Jika suatu daerah tidak mengalami inflasi, maka akan menimbulkan stagnasi. Idealnya, agar laju inflasi dapat memacu peningkatan kegiatan perekonomian, tingkat inflasi harus berada pada angka kurang dari 5% (Murni, 2016:223).

Menurut Sukirno (2015:20) tingkat inflasi terutama dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke satu tahun lainnya. Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen, atau lebih dikenal dengan istilah *Consumer Price Indeks* (CPI) yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen (Sukirno, 2015:19). Penelitian Suci Sukmawati (2018) menunjukkan bahwa variabel PDRB, jumlah pelanggan listrik dan inflasi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Medan.

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Herwig Immervoll (2000) menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan penerimaan kontribusi asuransi sosial.

Hasil penelitian Hidayati Sania, Eva Anggra Yunita, Ibnu Muttaqin (2018) menunjukkan bahwa jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak daerah. Jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi berpengaruh terhadap pajak daerah sebesar 62,4% sedangkan sisanya sebesar 37,6% dipengaruhi oleh model lain di luar penelitian tersebut.

### **2.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Menurut Murni (2016:184) pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan *Gross National Product* (GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan *output per capita* dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Dengan adanya peningkatan standar hidup masyarakat, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak daerahnya pun akan meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu daerah. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi daerah sangat berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktiya Damayanti Suhadak, Maria Goretti Wi, Endang Nirowati Pamungkas (2016) menunjukkan bahwa Tingkat inflasi, *Economic Growth* dan Tarif Pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia (H2 diterima). Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Encep Herdiana Rachman Nalendra (2013) menunjukan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan

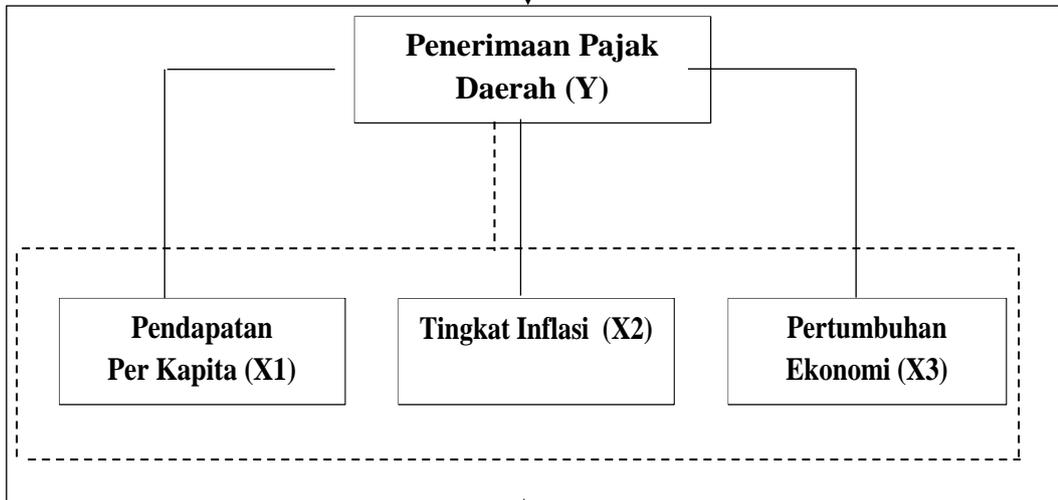
Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2012. Menurut Murni (2016:191) pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (tenaga kerja). Pertumbuhan tenaga kerja sangat ditentukan oleh pertumbuhan penduduk suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE merupakan presentasi angka yang memperlihatkan tinggi rendahnya maupun cepat lambatnya proses pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah maupun negara dalam satu tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kanghua Zeng, Shan Li, Qian Li (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan reformasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan struktur pajak. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap total penerimaan pajak dan struktur pajak dalam jangka pendek.

Penelitian Dian Triastuti, Dudi Pratomo (2016) hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung tahun 2007-2014. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah diperoleh nilai probabilitas (F-statistic)  $0,041262 < 0,05$  (taraf signifikansi 5%). Artinya, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/ Modal, dan Tingkat Inflasi secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disusun bagan kerangka pemikiran pada gambar 2.1 dan paradigma penelitian pada gambar 2.2 :

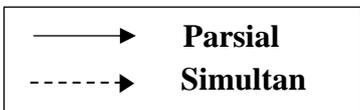
Berdasarkan Laporan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung yang diperoleh dari Dinas Pelayanan Pajak, penerimaan pajak daerah Kota Bandung selama beberapa tahun terakhir tidak dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak yang telah di anggarakan.



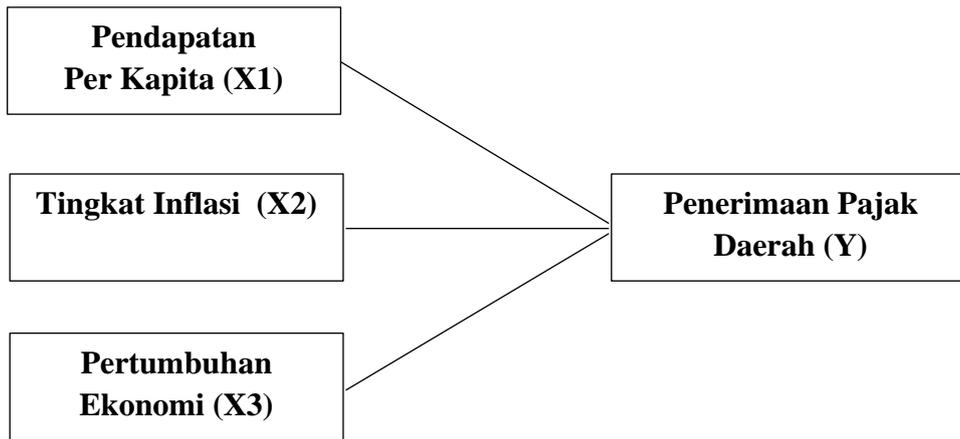
**Penelitian Terdahulu**

Kanghua Zeng, Shan Li, Qian Li (2014)	Suci Sukmawati (2018)
Herwig Immervoll (2000)	Puspita Suci Arianto (2014)
Abolfazl, Farzad, and Nahid (2012)	Hidayati, Eva, Ibnu (2018)
Oktiya, Maria, dan Endang (2016)	Dian T, Dudi P (2016)
Pidelis, Debby, dan Krest (2016)	Encep Herdiana Rachmat (2013)

**Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018**



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**



**Gambar 2.2. Paradigma Penelitian**

## **2.2 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sekaran (2017:94) hipotesis merupakan pernyataan sementara, namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang ingin ditemukan oleh peneliti dalam empiris penelitiannya. Sedangkan menurut Sugiyono (2017:64) hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Kerangka konseptual menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Per Kapita (X1), Tingkat Inflasi (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Daerah (Y). Maka dari itu, hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari :

H<sub>1</sub> : Pendapatan per kapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah

H<sub>2</sub> : Tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah

H<sub>3</sub> : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah

H<sub>4</sub> : Pendapatan per kapita, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu) (Sugiyono, 2014:13). Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Daerah pada Kota Bandung.

##### **3.1.1 Gambaran Umum Kota Bandung**

Kota Bandung merupakan Ibu kota Propinsi Jawa Barat yang terletak diantara 107 36' Bujur Timur, 6 55' Lintang Selatan. Ketinggian tanah 791m di atas permukaan laut, titik terendah  $\pm 675$  m berada di sebelah selatan dengan permukaan relatif datar dan titik tertinggi  $\pm 1.050$  m berada di sebelah utara dengan kontur yang berbukit-bukit. Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 Km, dimana sungai utamanya yaitu Sungai Cikapundung beserta anak-anak sungainya pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum. Keadaan geologis dan tanah yang ada di kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol begitu juga pada kawasan dibagian tengah dan barat, sedangkan kawasan dibagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan

tanah liat. Semetara iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk, dengan suhu rata-rata 23.5 °C, curah hujan rata-rata 200.4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21.3 hari per bulan.

Luas wilayah Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Wilayah pemerintahan terbagi dalam 30 Kecamatan, 151 Kelurahan yang terdiri dari 1.558 Rukun Warga (RT), dan 9.678 Rukun Tetangga (RT).

Kota Bandung dipimpin oleh Walikota dibantu oleh Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah yang membawahi 3 Asisten Sekretaris Daerah, dengan 11 Kepala Bagian, 11 Kepala Dinas, 6 Kepala Badan dan 2 Kepala Kantor, 1 Inspektorat serta 3 Rumah Sakit Daerah.

Secara administratif Kota Bandung berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lainnya yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
3. Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Dalam pelaksanaan Pembangunan Kesehatan diperlukan kerjasama dengan ketiga Kabupaten Kota diatas karena masalah-masalah kesehatan tidak mengenal batas wilayah kerja.

Kota Bandung memiliki 6 fungsi kota yaitu sebagai berikut :

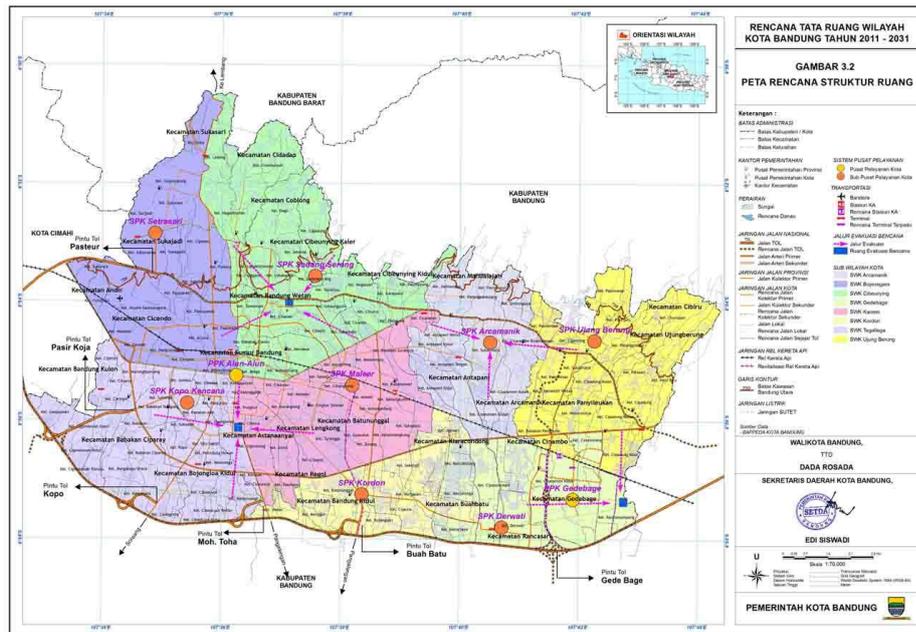
1. Pusat Pemerintahan Jawa Barat
2. Kota Ekonomi dan Perdagangan
3. Kota Pendidikan
4. Kota Budaya dan Wisata
5. Kota Industri
6. Etalase Jawa Barat

Posisi strategis Kota Bandung terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, dimana Kota Bandung ditetapkan dalam sistem perkotaan nasional sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Bandung tidak terlepas dari berbagai permasalahan akibat urbanisasi yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir dikarenakan semakin banyak pendatang yang menetap di kota Bandung dan mengakibatkan adanya urbanisasi yang membentuk budaya masyarakat yang heterogen sehingga pemerintah Kota Bandung perlu mengadakan penataan kota secara tepat.

Menurut Perda Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan yaitu :

1. Andir, terdiri dari enam kelurahan.
2. Antapani, terdiri dari empat kelurahan.
3. Arcamanik, terdiri dari empat kelurahan.
4. Astanaanyar, terdiri dari enam kelurahan.
5. Babakan ciparay, terdiri dari enam kelurahan.
6. Bandung Kidul, terdiri dari empat kelurahan.

7. Bandung Kulon, terdiri dari delapan kelurahan.
8. Bandung Wetan, terdiri dari tiga kelurahan.
9. Batununggal, terdiri dari delapan kelurahan.
10. Bojongloa Kaler, terdiri dari lima kelurahan.
11. Bojongloa Kidul, terdiri dari enam kelurahan.
12. Buahbatu, terdiri dari empat kelurahan.
13. Cibeunying Kaler, terdiri dari empat kelurahan.
14. Cibeunying Kidul, terdiri dari enam kelurahan.
15. Cibiru, terdiri dari empat kelurahan.
16. Cicendo, terdiri dari enam kelurahan.
17. Cidadap, terdiri dari tiga kelurahan.
18. Cinambo, terdiri dari empat kelurahan.
19. Coblong, terdiri dari enam kelurahan.
20. Gedebage, terdiri dari empat kelurahan.
21. Kiaracondong, terdiri dari enam kelurahan.
22. Lengkong, terdiri dari tujuh kelurahan.
23. Mandalajati, terdiri dari empat kelurahan.
24. Panyileukan, terdiri dari empat kelurahan.
25. Rancasari, terdiri dari empat kelurahan.
26. Regol, terdiri dari tujuh kelurahan.
27. Sukajadi, terdiri dari lima kelurahan.
28. Sukasari, terdiri dari empat kelurahan.
29. Sumur Bandung, terdiri dari empat kelurahan.
30. Ujungberung, terdiri dari lima kelurahan.



**Gambar 3.1 Peta Kota Bandung**

### 3.1.1.1 Sejarah Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681.

Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah Selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki "Dalem Kaum I", kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan Hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811). Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di

ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Asia Afrika - Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808/awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya

pindah lagi ke Kampung Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang).

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

### **3.1.1.2 Lambang Kota Bandung**

Lambang Kota Bandung secara keseluruhan adalah sebuah perisai yang berbentuk jantung. Perisai tersebut terbagi menjadi dua bagian oleh sebuah balok lintang mendatar bertajuk empat buah, yang berwarna hitam dengan pelisir berwarna putih perak pada pinggir sebelah atasnya.



**Gambar 3.2 Lambang Kota Bandung**

Arti Lambang Kota Bandung, yaitu :

1. Bagian atas latar kuning emas dengan lukisan sebuah gunung berwarna hijau yang bertumpu pada blok-lintang.
2. Bagian bawah latar putih perak dengan lukisan empat bidang jalur mendatar berombak yang berwarna biru.
3. Di bawah perisai itu terlukis sehelai pita berwarna kuning emas yang melambai pada kedua ujungnya, Pada pita itu tertulis dengan huruf-huruf besar latin berwarna hitam amsal dalam bahasa kawi, yang berbunyi Gemah Ripah Wibawa Mukti.
4. Sebagai tokoh lambang itu diambil bentuk perisai atau tameng, yang dikenal kebudayaan dan peradaban sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuan dengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang demikian itu dijadikan lambang yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran

Arti warna-warna dalam Lambang Kota Bandung

- Kuning (emas), berarti : kesejahteraan, keluhungan.
- Hitam (sabel), berarti : kokoh, tegak, kuat.
- Hijau (sinopel), berarti : kemakmuran sejuk
- Putih (perak), berarti : kesucian
- Biru (azuur), berarti : kesetiaan

Arti Motto Kota Bandung

- Gemah Ripah Wibawa Mukti, berarti : Tanah Subur Rakyat Makmur

### 3.1.1.3 Visi dan Misi Kota Bandung

#### 1. Visi Kota Bandung :

"Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)".

Untuk Merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu :

- a. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ), penyakit masyarakat ( judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa.
- b. Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya.
- c. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota.
- d. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya. Jadi kota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya.

## **2. Misi Kota Bandung :**

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :

- a. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
- b. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
- c. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.

- d. Meningkatkan penataan Kota , yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota .
- e. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
- f. Mengembangkan sistem keuangan kota , mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

## **3.2 Metode Penelitian**

### **3.2.1 Desain Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:2) metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati cara-cara yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dipilih karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik. Menurut Sugiyono (2017:8) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positivisme*. Digunakan pada

populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2017:147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Melalui statistik deskriptif maka dapat diperoleh deskripsi mengenai Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Menurut Sugiyono (2017:6) pendekatan penelitian verifikatif adalah metode penelitian melalui pengujian hipotesis menggunakan suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. Penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis, dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji regresi linear berganda (*multiple regression/multivariate*). Uji regresi linear berganda adalah studi untuk mengetahui ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan utama yaitu mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai variabel Y atas variabel X.

### 3.2.2 Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Chandrarin (2017:82) variabel didefinisi sebagai sesuatu atau apapun yang mempunyai nilai dan dapat diukur, baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible).

Sesuai dengan judul skripsi yaitu “Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah.” Maka definisi dari setiap variabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen / Variabel Bebas.

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2017:39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Per Kapita (X1), Tingkat Inflasi (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3).

2. Variabel Dependen / Variabel Terikat.

Variable dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Daerah (Y).

Berikut ini adalah tabel operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

**Tabel 3.1 Operasional Variabel**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Pengertian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Pendapatan Per Kapita (X1)	<p>Pendapatan Per Kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu.</p> <p>(Sukirno, 2015:424)</p>	<p>Jumlah Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 2011-2018</p> <p>Jumlah penduduk dari tahun 2011-2018</p> $PDB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Rasio
Tingkat Inflasi (X2)	<p>Tingkat inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga-harga di pasaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan.</p> <p>(Murni, 2016:218)</p>	<p>Berdasarkan perkembangan laju inflasi di Kota Bandung tahun 2011-2018.</p> <p>(Badan Pusat Statistik)</p>	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi (X3)	<p>Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per capita dan meningkatnya standar hidup masyarakat.</p> <p>(Murni, 2016:184)</p>	<p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun t atau tahun berjalan pada periode 2011-2018</p> <p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun t-1 atau tahun sebelumnya pada periode 2011-2018</p> $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$	Rasio

Penerimaan Pajak Daerah (Y)	“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (UU No. 34 Tahun 2000)	Menurut Frangky Martinus Mea, Vicky V. J. Panelewen Arie D. P. Mirah (2017) indikator yang digunakan yaitu :  3) Pertumbuhan, Pertumbuhan penerimaan daerah merupakan indikator untuk melihat sejauh mana perkembangan suatu ayat penerimaan dari tahun ketahun. 4) Kontribusi/Proporsi dari ayat penerimaan daerah merupakan sumbangan yang diukur dalam bentuk prosentase suatu ayat penerimaan terhadap total ayat penerimaan (pajak).	Rasio
-----------------------------	---	--	-------

### 3.2.3 Populasi Dan Sampel

#### 1) Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Daerah pada Kota Bandung.

#### 2) Sampel

Menurut Chandrarin (2017:125) sampel adalah kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus mewakili (*representative*) anggota populasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*. Menurut Sugiyono (2017:82) *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2017:82) *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018 yang berjumlah 32 sampel yang di peroleh berdasarkan kategori data per triwulan.

#### **3.2.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017:224).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya (Chandrarini, 2017:124). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengunduh dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian.

Selain data sekunder dalam bentuk dokumen yang diunduh, penjelasan mengenai pengumpulan data sekunder lainnya yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

## 1. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dengan cara mengumpulkan data dengan mengolah, mencari, dan mempelajari bahan-bahan dan membandingkan dengan beberapa sumber kepustakaan, seperti buku *literature*, jurnal, serta referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

## 2. Studi Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu proses perolehan dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen dan data yang diperlukan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung, serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bandung Periode 2011-2018. Data sekunder ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

### **3.2.5 Rancangan Pengujian Hipotesis**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data secara kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2017:13). Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

### **3.2.5.1 Analisis Deskriptif**

Menurut Chandrarin (2017:134) analisis deskriptif menjelaskan tentang bagaimana karakteristik sampel penelitian dengan menggunakan rerata, *standard deviation*, maksimum dan minimum. Sedangkan menurut Sugiyono (2017:147) analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan kondisi variabel yaitu Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

### **3.2.5.2 Analisis Verifikatif**

Analisis verifikatif merupakan model analisis untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada penelitian ini, analisis verifikatif bermaksud untuk mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

### **3.2.5.3 Uji Asumsi Klasik**

Menurut Nugraha (2017) uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat dikatakan sebagai persamaan regresi yang baik, maksudnya adalah persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi.

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas yang akan dijelaskan sebagai berikut :

### 1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Normalitas pada suatu data dapat dilihat dari gambar histogram, tetapi seringkali polanya tidak mengikuti bentuk kurva normal, sehingga sulit untuk disimpulkan. Agar lebih mudah, dapat dilihat melalui koefisien *Jarque-Bera* (J-B) dan probabilitasnya karena kedua angka tersebut saling mendukung. Menurut Winarno (2015:541) *Jarque-Bera* adalah uji statistik untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal.

Hipotesis yang akan di uji yaitu :

$H_0$  = berdistribusi normal

$H_a$  = tidak berdistribusi normal

Terdapat dua cara untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal, yaitu :

- 1) Jika nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari J-B tabel), maka data terdistribusi normal.
- 2) Jika probabilitas lebih besar dari 5% (tingkat signifikansi), maka data terdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:107) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Hipotesis yang akan di uji yaitu :

$H_0$  = tidak terjadi multikolinearitas

$H_a$  = terjadi multikolinearitas

Terdapat dua cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di model regresi yaitu :

- a. Menganalisis matrik koreksi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada koreksi yang cukup tinggi (umumnya 0.90), maka  $H_a$  ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
- b. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas yaitu nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ .

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas.

Hipotesis yang akan di uji yaitu :

$H_0$  = tidak terjadi heteroskedastisitas

$H_a$  = terjadi heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, penetapan kriterianya menggunakan Breusch-Pagan-Godfrey. Jika nilai probabilitas Chi-square  $> 0,05$  (5%) atau nilai Obs\*R-Square  $<$  nilai Chi-square tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### 4) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu dengan menggunakan Uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson hanya digunakan

untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen.

Hipotesis yang akan di uji yaitu :

$H_0$  = tidak ada autokorelasi

$H_a$  = ada autokorelasi

Menurut Santoso (2016), terdapat tiga angka kriteria Durbin Watson, yaitu :

- 1) Jika DW bernilai dibawah -2, maka terjadi autokorelasi positif
- 2) Jika DW berada diantara -2 dan +2, maka tidak terjadi autokorelasi
- 3) Jika DW bernilai diatas +2, maka terjadi autokorelasi negatif

#### **3.2.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda**

Menurut Sekaran (2017:139) analisis regresi berganda adalah teknik multivariate yang seringkali digunakan dalam penelitian bisnis. Poin awal dari analisis regresi berganda, adalah model konseptual (dan hipotesis berasal dari model tersebut) yang sudah dibuat peneliti pada tahap sebelumnya dari proses penelitian.

Adapun model persamaan regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Daerah

a = Konstanta

b1 b2 = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Pendapatan Per Kapita

X<sub>2</sub> = Tingkat Inflasi

X<sub>3</sub> = Pertumbuhan Ekonomi

e = Kesalahan/error

### 3.2.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Uji t (parsial) dan Uji F (Simultan). Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

#### 1. Uji t (pengujian secara parsial)

Menurut Chandrarin (2017:138) uji t dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap satu variabel dependen sebagaimana yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi. Menurut Ghozali (2018:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel independen. Menurut Hastuti (2017) langkah-langkah pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan taraf nyata signifikan penelitian sebesar  $\alpha = 5\%$

Taraf nyata signifikan penelitian 0,05 (5%) artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5% dengan derajat kebebasan ( $df=n-k-1$ ).

- 2) Kriteria pengambilan keputusan

- a.  $H_0$  ditolak jika probabilitas value  $< 0,05$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$
- b.  $H_0$  tidak ditolak jika probabilitas value  $> 0,05$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$

Adapun penerapan hipotesis secara parsial dalam penelitian ini adalah :

H<sub>01</sub> : Pendapatan Per Kapita secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap  
Penerimaan Pajak Daerah.

H<sub>a1</sub> : Pendapatan Per Kapita secara parsial berpengaruh positif terhadap  
Penerimaan Pajak Daerah.

H<sub>02</sub> : Tingkat Inflasi secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan  
Pajak Daerah.

H<sub>a2</sub> : Tingkat Inflasi secara parsial berpengaruh positif terhadap Penerimaan  
Pajak Daerah.

H<sub>03</sub> : Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap  
Penerimaan Pajak Daerah.

H<sub>a3</sub> : Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap  
Penerimaan Pajak Daerah.

## **2. Uji F (pengujian secara simultan)**

Menurut Chandrarin (2017:140) uji f dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pengaruh semua variabel independen terhadap satu variabel dependen sebagaimana yang diformulasikan dalam satu model persamaan regresi linier berganda sudah tepat. Sedangkan menurut Ghozali (2018:179) uji pengaruh bersama-sama (joint) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau joint mempengaruhi variabel dependen.

Penerapan hipotesis secara parsial dalam penelitian ini adalah :

H<sub>0</sub> : Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara  
bersama-sama tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak  
Daerah.

$H_a$  : Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Adapun kriteria pengambilan keputusannya yaitu :

$H_0$  ditolak jika probabilitas value  $< 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$

$H_0$  tidak ditolak jika probabilitas value  $> 0,05$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$

### **3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Chandrarin (2017:141) koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Sedangkan menurut Ghozali (2018:97) koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018

###### 4.1.1.1 Pendapatan Per Kapita Pada Kota Bandung Periode 2011-2018

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu (Sukirno, 2015:424). Menurut Murni (2016:192) pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator yang telah lama digunakan dalam makro-ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berikut ini merupakan data persentase pendapatan per kapita pada kota Bandung periode 2011-2018 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

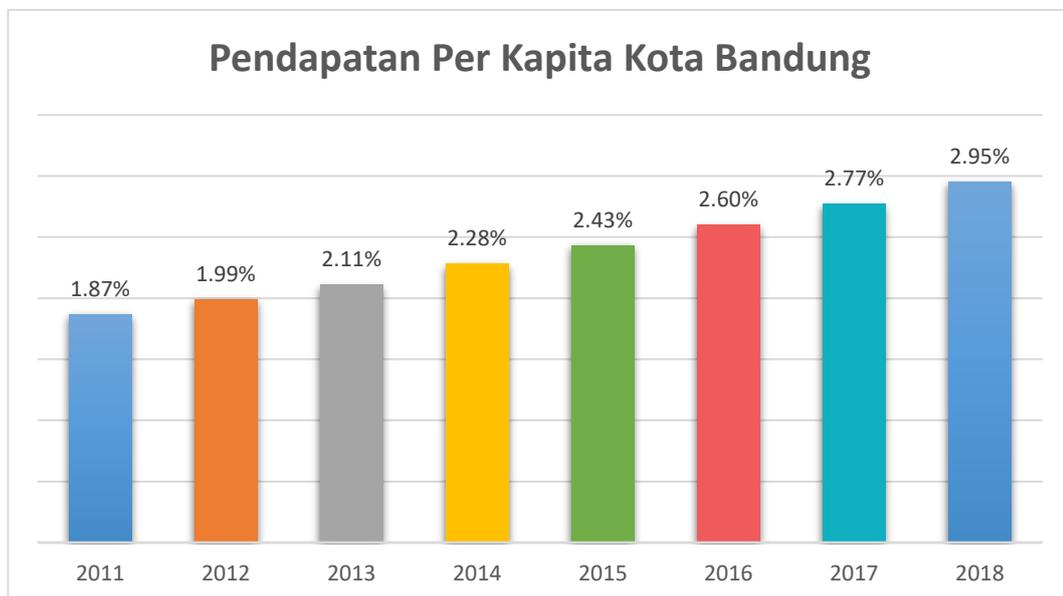
**Pendapatan Per Kapita Kota Bandung periode 2011-2018**

Tahun	Pendapatan Per Kapita (%)				Total
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
2011	0,43	0,45	0,46	0,53	1,87
2012	0,45	0,48	0,51	0,55	1,99
2013	0,48	0,52	0,53	0,58	2,11
2014	0,49	0,51	0,55	0,73	2,28
2015	0,53	0,56	0,59	0,75	2,43
2016	0,55	0,60	0,70	0,75	2,60
2017	0,59	0,61	0,72	0,85	2,77
2018	0,61	0,73	0,80	0,81	2,95

<b>Minimum</b>		<b>1,87</b>
<b>Maximum</b>		<b>2,95</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>2,37</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah Penulis), 2019

Untuk lebih mudah menginterpretasikan gambaran Pendapatan Per Kapita pada Kota Bandung, maka berikut ini penulis menyertakan gambaran Pendapatan Per Kapita pada Kota Bandung dalam bentuk grafik dengan angka persentase rasio sebagai berikut :



**Gambar 4.1**  
**Grafik Pendapatan Per Kapita Kota Bandung periode 2011-2018**

Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Pendapatan Per Kapita pada Kota Bandung periode 2011-2018 menunjukkan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun kenaikannya cenderung tidak terlalu banyak. Pada tahun 2011 menunjukkan nilai Pendapatan Per Kapita sebesar 1,87%. Pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan dengan nilai Pendapatan Per Kapita sebesar 1,99%. Pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan dengan nilai Pendapatan Per Kapita sebesar 2,11%. Pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan

dengan nilai Pendapatan Per Kapita sebesar 2,28%. Pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan dengan nilai Pendapatan Per Kapita sebesar Rp 2,43%. Pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dengan nilai Pendapatan Per Kapita sebesar 2,60%. Pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan dengan nilai Pendapatan Per Kapita sebesar 2,77% dan pada tahun 2018 juga menunjukkan peningkatan dengan nilai Pendapatan Per Kapita sebesar 2,95%. Dari tabel dan grafik diatas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata Pendapatan Per Kapita pada Kota Bandung periode 2011-2018 terus mengalami peningkatan tetapi memang peningkatan yang terjadi dapat dikatakan tidak terlalu signifikan karena angka peningkatannya relatif kecil.

#### **4.1.1.2 Tingkat Inflasi Pada Kota Bandung Periode 2011-2018**

Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi merupakan kejadian ekonomi yang sering terjadi meskipun kita tidak pernah menghendaki. Tingkat inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga-harga di pasaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Murni, 2016:218). Pada dasarnya kenaikan harga merupakan hal yang wajar dan memang lazim terjadi, karena dengan adanya kenaikan harga, maka suatu daerah dapat mengalami proses pertumbuhan ekonomi (Murni, 2016:223). Tingkat inflasi terutama dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya (Sukirno, 2015:20). Berikut ini merupakan data tingkat inflasi pada kota bandung periode 2011-2018 yaitu sebagai berikut :

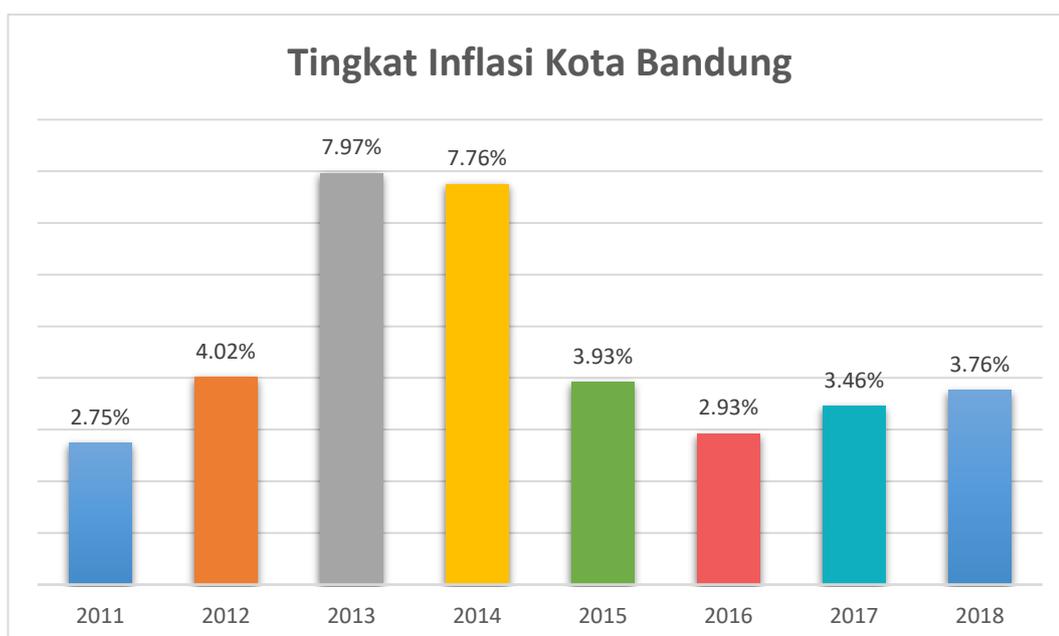
**Tabel 4.2**

**Tingkat Inflasi Kota Bandung periode 2011-2018**

Tahun	Tingkat Inflasi (%)				Total
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
2011	0,56	0,62	0,73	0,84	2,75
2012	0,87	0,94	1,00	1,21	4,02
2013	1,32	1,48	2,10	3,07	7,97
2014	1,00	1,43	2,16	3,17	7,76
2015	0,82	0,90	1,00	1,21	3,93
2016	0,60	0,71	0,80	0,82	2,93
2017	0,74	0,81	0,90	1,01	3,46
2018	0,76	0,83	0,88	1,29	3,76
<b>Minimum</b>					<b>2,75</b>
<b>Maximum</b>					<b>7,97</b>
<b>Rata-rata</b>					<b>4,57</b>

**Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah Penulis), 2019**

Untuk lebih mudah menginterpretasikan gambaran Tingkat Inflasi pada Kota Bandung, maka penulis menyertakan gambaran Tingkat Inflasi pada Kota Bandung dalam bentuk grafik berikut :



**Gambar 4.2**

**Grafik Tingkat Inflasi Kota Bandung periode 2011-2018**

Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Tingkat Inflasi pada Kota Bandung periode 2011-2018 menunjukkan nilai yang bervariasi setiap tahunnya, karena kedudukannya yang hampir seimbang antara peningkatan dan penurunan nilainya, tetapi cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 menunjukkan nilai Tingkat Inflasi sebesar 2,75%. Pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan dengan nilai Tingkat Inflasi sebesar 4,02%. Pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dengan nilai Tingkat Inflasi sebesar 7,97%. Pada tahun 2014 menunjukkan penurunan dengan nilai Tingkat Inflasi sebesar 7,76%. Pada tahun 2015 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dengan nilai Tingkat Inflasi sebesar 3,93%. Pada tahun 2016 menunjukkan penurunan dengan nilai Tingkat Inflasi sebesar 2,93%. Pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan dengan nilai Tingkat Inflasi sebesar 3,46% dan pada tahun 2018 juga menunjukkan peningkatan dengan nilai Tingkat Inflasi sebesar 3,76%. Dari tabel dan grafik diatas, dapat kita ketahui bahwa nilai rata-rata Tingkat Inflasi pada Kota Bandung dapat dikatakan cenderung kurang stabil karena terus menerus mengalami peningkatan dan penurunan pada periode 2011-2018.

#### **4.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Pada Kota Bandung Periode 2011-2018**

Menurut Sukirno (2015:9) Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai : perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu dalam ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara (Sukirno, 2015:423). Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atau *Rate of Economic Growth* adalah suatu angka

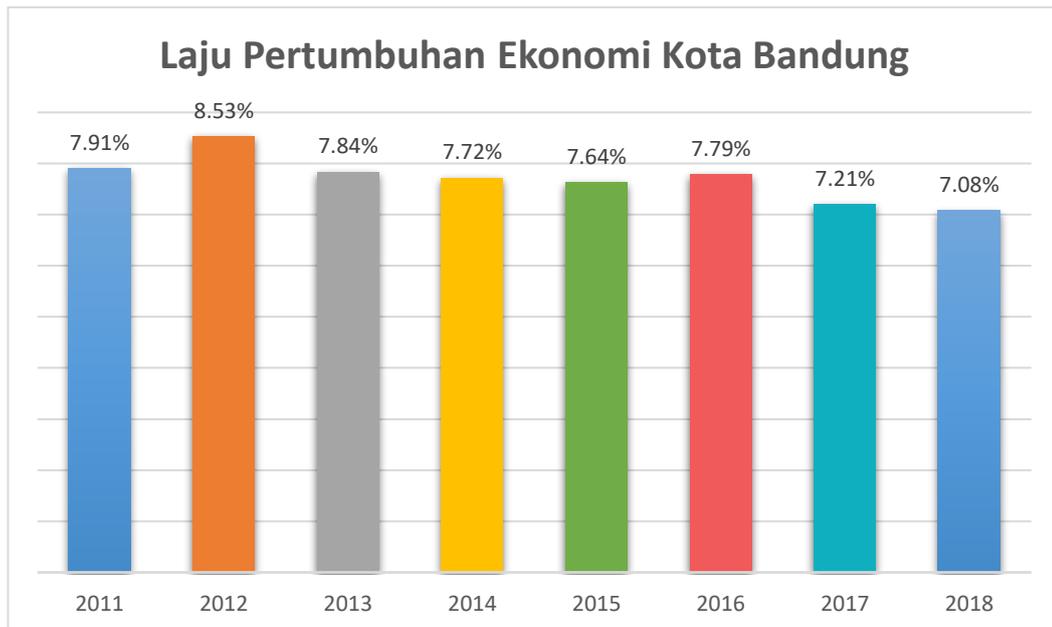
dalam presentase yang memperlihatkan tinggi rendahnya atau cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam satu tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya (Murni, 2016:39). Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan ekonomi. Berikut ini merupakan data tingkat inflasi pada kota bandung periode 2011-2018 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung periode 2011-2018**

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				Total
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
2011	1,03	1,44	2,38	3,06	7,91
2012	1,05	1,94	2,45	3,09	8,53
2013	1,00	1,44	2,36	3,04	7,84
2014	1,00	1,39	2,33	3,00	7,72
2015	1,00	1,27	2,30	3,07	7,64
2016	1,00	1,95	2,00	2,34	7,79
2017	1,00	1,85	1,96	2,40	7,21
2018	1,00	1,80	2,10	2,18	7,08
<b>Minimum</b>					<b>7,08</b>
<b>Maximum</b>					<b>8,53</b>
<b>Rata-rata</b>					<b>7,71</b>

**Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah Penulis), 2019**

Untuk lebih mudah menginterpretasikan gambaran Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Kota Bandung, penulis menggunakan persentase rasio. Maka berikut ini penulis menyertakan gambaran Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Kota Bandung dalam bentuk grafik dengan angka persentase rasio sebagai berikut :



**Gambar 4.3**  
**Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung periode 2011-2018**

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kota Bandung periode 2011-2018 menunjukkan nilai yang bervariasi setiap tahunnya, dan cenderung mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan karena angka penurunannya relatif kecil, meskipun pada tahun 2012 dan tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 menunjukkan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,91%. Pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan dengan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 8,53%. Pada tahun 2013 menunjukkan penurunan dengan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,84%. Pada tahun 2014 menunjukkan penurunan dengan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,72%. Pada tahun 2015 menunjukkan penurunan dengan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,64%. Pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dengan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,79%. Pada tahun 2017 menunjukkan penurunan dengan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,21% dan pada tahun 2018 juga menunjukkan penurunan dengan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,08%.

#### 4.1.1.4 Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang digunakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berikut ini merupakan data penerimaan pajak daerah pada kota bandung periode 2011-2018 dalam persentase yaitu sebagai berikut :

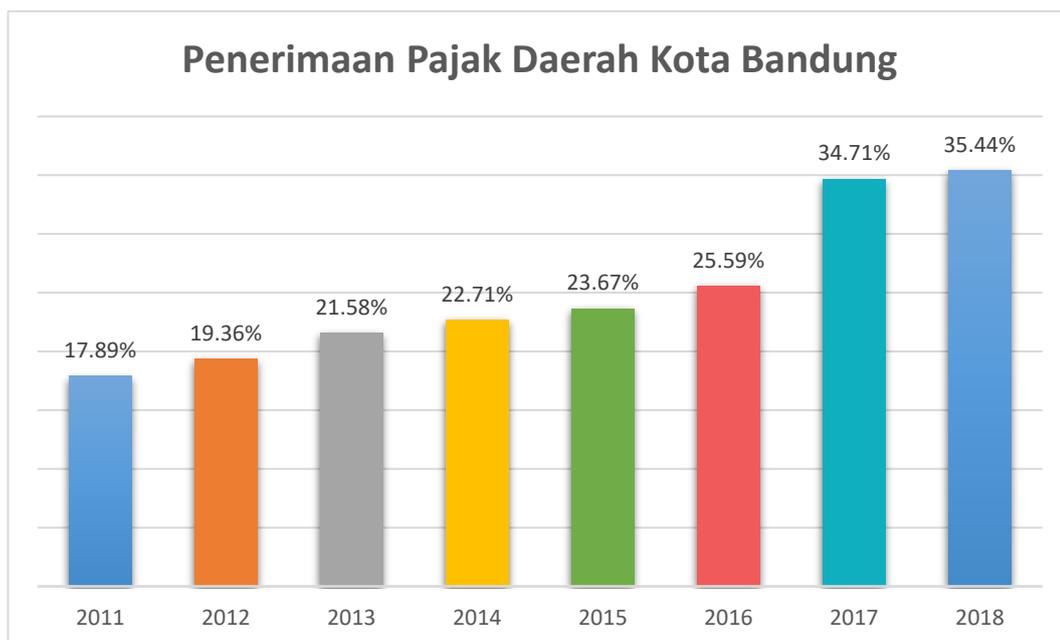
**Tabel 4.4**

**Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung periode 2011-2018**

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (%)				Total
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
2011	2,67	3,33	5,75	6,14	17,89
2012	3,25	4,12	5,81	6,18	19,36
2013	4,15	5,21	5,98	6,24	21,58
2014	4,17	5,25	6,03	7,26	22,71
2015	4,21	5,37	6,32	7,77	23,67
2016	4,82	5,91	6,83	8,03	25,59
2017	6,24	8,32	9,41	10,74	34,71
2018	6,38	8,57	9,61	10,88	35,44
<b>Minimum</b>					<b>17,89</b>
<b>Maximum</b>					<b>35,44</b>
<b>Rata-rata</b>					<b>25,12</b>

**Sumber : Dinas Pelayanan Pajak (Diolah Penulis), 2019**

Untuk lebih mudah menginterpretasikan gambaran Penerimaan Pajak Daerah pada Kota Bandung, maka berikut ini penulis menyertakan gambaran Penerimaan Pajak Daerah pada Kota Bandung dalam bentuk grafik sebagai berikut:



**Gambar 4.4**  
**Grafik Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung periode 2011-2018**

Berdasarkan tabel 4.5 dan grafik 4.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Penerimaan Pajak Daerah pada Kota Bandung periode 2011-2018 menunjukkan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya dan cukup signifikan. Tetapi meskipun begitu, anggaran Penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya tetap belum dapat terealisasikan meskipun setiap tahunnya terjadi peningkatan Penerimaan Pajak Daerah. Pada tahun 2011 menunjukkan nilai Penerimaan Pajak Daerah sebesar 17,89%. Pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan dengan nilai Penerimaan Pajak Daerah sebesar 19,36%. Pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan dengan nilai Penerimaan Pajak Daerah sebesar 21,58%. Pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan dengan nilai Penerimaan Pajak Daerah sebesar 22,71%. Pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan dengan nilai Penerimaan Pajak Daerah sebesar 23,67%. Pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dengan nilai Penerimaan Pajak Daerah sebesar 25,59%. Pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan dengan nilai Penerimaan Pajak Daerah sebesar 34,71% dan pada tahun 2018 juga menunjukkan peningkatan dengan

nilai Penerimaan Pajak Daerah sebesar 35,44%. Dari tabel dan grafik diatas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata Penerimaan Pajak Daerah pada Kota Bandung periode 2011-2018 terus mengalami peningkatan dan peningkatan yang terjadi dapat dikatakan cukup signifikan karena nilai Penerimaan Pajak Daerah semakin membesar dari tahun ke tahun.

#### **4.1.2 Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Secara Parsial Pada Kota Bandung Periode 2011-2018**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:147). Adapun statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi, skewness dan kurtosis. Hasil pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

	Y (Penerimaan Pajak Daerah)	X1 (Pendapatan Per Kapita)	X2 (Tingkat Inflasi)	X3 (Pertumbuhan Ekonomi)
Mean	6.279688	0.593750	1.143125	1.913125
Median	6.085000	0.555000	0.900000	1.955000
Maximum	10.88000	0.850000	3.170000	3.090000
Minimum	2.670000	0.430000	0.560000	1.000000
Std. Dev.	2.069320	0.117796	0.637902	0.712467
Skewness	0.513998	0.645478	2.072500	0.142710
Kurtosis	2.798263	2.266416	6.649933	1.867046

**Sumber : Diolah Penulis, 2019**

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat dijelaskan hasil pengujian statistik deskriptif yaitu sebagai berikut :

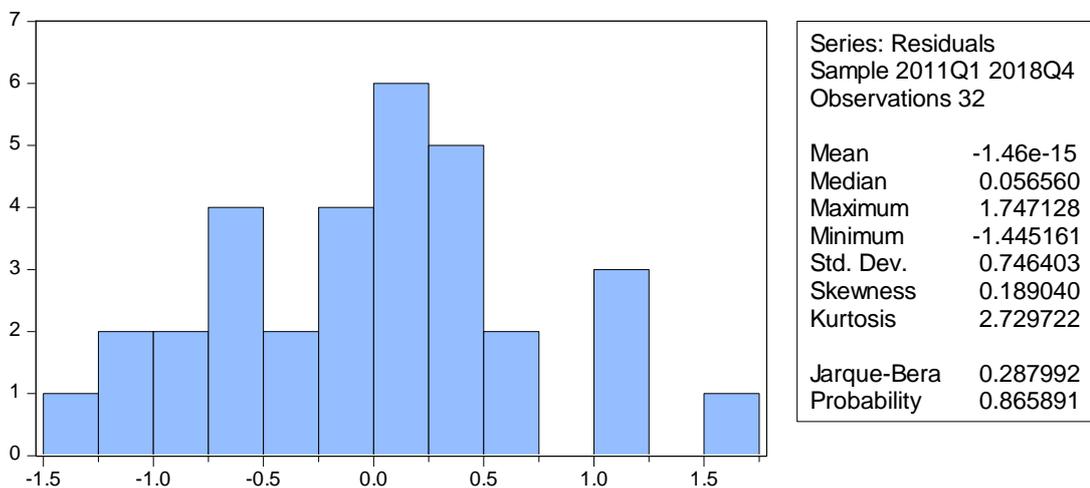
1. Variabel Pendapatan Per Kapita menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.593750 dengan median sebesar 0.555000. Nilai maksimum sebesar 0.850000 dan nilai minimum sebesar 0.430000. Nilai standar deviasi sebesar 0.117796, nilai skewness sebesar 0.645478 dan nilai kurtosis sebesar 2.266416.
2. Variabel Tingkat Inflasi menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 1.143125 dengan median sebesar 0.900000. Nilai maksimum sebesar 3.170000 dan nilai minimum sebesar 0.560000. Nilai standar deviasi sebesar 0.637902, nilai skewness sebesar 2.072500 dan nilai kurtosis sebesar 6.649933.
3. Variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 1.913125 dengan median sebesar 1.955000. Nilai maksimum sebesar 3.090000 dan nilai minimum sebesar 1.000000. Nilai standar deviasi sebesar 0.712467, nilai skewness sebesar 0.142710 dan nilai kurtosis sebesar 1.867046.
4. Variabel Penerimaan Pajak Daerah menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 6.279688 dengan median sebesar 6.085000. Nilai maksimum sebesar 10.88000 dan nilai minimum sebesar 2.670000. Nilai standar deviasi sebesar 2.069320, nilai skewness sebesar 0.513998 dan nilai kurtosis sebesar 2.798263.

#### 4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018:161). Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji *Jarque Bera* dan nilai *probability* diperoleh hasil sebagai berikut :

**Gambar 4.5 Uji Normalitas**



**Sumber : Diolah Penulis, 2019**

Berdasarkan gambar 4.5 diatas, dapat diketahui nilai probabilitas atau nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil uji *Jarque-Bera* adalah sebesar 7,82 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai *Jarque-Bera* nya yaitu sebesar 0,28 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,86 atau lebih besar dari tingkat kekeliruan sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi diatas berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2018:107). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors

Date: 12/27/19 Time: 17:14

Sample: 2011Q1 2018Q4

Included observations: 32

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.557642	28.93042	NA
X1	1.727861	32.80702	1.204974
X2	0.064635	5.703677	1.321862
X3	0.060993	13.13759	1.556042

**Sumber : Diolah Penulis, 2019**

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat diketahui nilai *Coefficient Variance* dari masing-masing variabel tidak ada yang bernilai lebih dari 90. Dimana  $X_1 1.72 < 90$ ,  $X_2 0,06 < 90$  dan  $X_3 0,06 < 90$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas.

### 3) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas yang telah dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey* diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.255662	Prob. F(3,28)	0.3086
Obs*R-squared	3.794617	<b>Prob. Chi-Square(3)</b>	<b>0.2845</b>
Scaled explained SS	2.512641	Prob. Chi-Square(3)	0.4730

**Sumber : Diolah Penulis, 2019**

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *p-value prob.chi-square(3)* sebesar 0,2845 dengan nilai  $\alpha$  0,05, sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, hal tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

### 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini, untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* yang diperoleh dari hasil uji autokorelasi sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	5.605494	Prob. F(2,26)	0.0095
Obs*R-squared	9.641013	Prob. Chi-Square(2)	0.0081

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/27/19 Time: 17:03

Sample: 2011Q1 2018Q4

Included observations: 32

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.621084	0.699304	0.888146	0.3826
X1	0.165356	1.205613	0.137155	0.8920
X2	0.006124	0.240091	0.025506	0.9798
X3	-0.373650	0.255687	-1.461359	0.1559
RESID(-1)	0.734983	0.220837	3.328166	0.0026
RESID(-2)	-0.419196	0.222160	-1.886914	0.0704
R-squared	0.301282	Mean dependent var		-1.46E-15
Adjusted R-squared	0.166913	S.D. dependent var		0.746403
S.E. of regression	0.681269	Akaike info criterion		2.237643
Sum squared resid	12.06733	Schwarz criterion		2.512468
Log likelihood	-29.80228	Hannan-Quinn criter.		2.328739
F-statistic	2.242198	<b>Durbin-Watson stat</b>		<b>1.689778</b>
Prob(F-statistic)	0.080152			

**Sumber : Diolah Penulis, 2019**

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi tersebut menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,689778 yang selanjutnya nilai *Durbin-Watson* ini akan dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan yaitu  $-2 < 1,689778 < +2$ , karena nilai *Durbin-Watson* berada diantara -2 dan +2 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

#### 4.1.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda adalah teknik multivariate yang seringkali digunakan dalam penelitian bisnis. Poin awal dari analisis regresi berganda, tentu saja adalah model konseptual (dan hipotesis berasal dari model tersebut) yang sudah dibuat oleh peneliti pada tahap sebelumnya dari proses penelitian (Sekaran, 2017:139). Selain itu, menurut Ghazali (2018:50) analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Berdasarkan pengujian regresi data *Time Series*, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Analisis Regresi Linear Berganda**

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/27/19 Time: 16:47

Sample: 2011Q1 2018Q4

Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.385474	0.746754	-4.533584	0.0001
X1	15.08834	1.314481	11.47855	0.0000
X2	-0.241394	0.254234	-0.949496	0.3505
X3	0.513507	0.246968	2.079246	0.0469

**Sumber : Diolah Penulis, 2019**

Model persamaan regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

$$Y = -3.385474 + 15,08834 - 0,241394 + 0,513507 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi yang telah disusun, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Apabila  $\alpha$  = konstanta sebesar -3.385474, berarti bahwa jika variabel independen yaitu Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Daerah akan bertambah sebesar -3.385474.
2. Apabila nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Per Kapita menunjukkan nilai sebesar 15,08834, berarti bahwa jika variabel Pendapatan Per Kapita mengalami peningkatan sebesar 1, sedangkan variabel independen lainnya yaitu Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependennya yaitu Penerimaan Pajak Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 15,08834.
3. Apabila nilai koefisien regresi variabel Tingkat Inflasi menunjukkan nilai sebesar - 0,241394, berarti bahwa jika variabel Tingkat Inflasi mengalami peningkatan sebesar 1, sedangkan variabel independen lainnya yaitu Pendapatan Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependennya yaitu Penerimaan Pajak Daerah akan mengalami penurunan sebesar - 0,241394.
4. Apabila nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan nilai sebesar 0,513507, berarti bahwa jika variabel Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1, sedangkan variabel independen lainnya yaitu Pendapatan Per Kapita dan Tingkat Inflasi dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependennya yaitu Penerimaan Pajak Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,513507.

#### 4.1.2.3 Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap satu variabel dependen sebagaimana yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi (Chandrarin, 2017:138).

Adapun kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut :

- c.  $H_0$  ditolak jika probabilitas value  $< 0,05$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$
- d.  $H_0$  tidak ditolak jika probabilitas value  $> 0,05$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$

#### 1) Pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah

**Tabel 4.10**

**Pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.385474	0.746754	-4.533584	0.0001
<b>X1</b>	<b>15.08834</b>	<b>1.314481</b>	<b>11.47855</b>	<b>0.0000</b>
X2	-0.241394	0.254234	-0.949496	0.3505
X3	0.513507	0.246968	2.079246	0.0469

**Sumber : Diolah Penulis, 2019**

Adapun hipotesisnya yaitu sebagai berikut :

$H_{01}$  : Pendapatan Per Kapita secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

$H_{a1}$  : Pendapatan Per Kapita secara parsial berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai signifikansi variabel Pendapatan Per Kapita sebesar  $0,0000 < 0,05$  (taraf nyata signifikansi penelitian) dan  $t_{hitung} 11,47855 > t_{tabel} 2,048$ . Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang artinya secara parsial Pendapatan Per Kapita berpengaruh positif terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah.

## 2) Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

**Tabel 4.11**

**Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.385474	0.746754	-4.533584	0.0001
X1	15.08834	1.314481	11.47855	0.0000
<b>X2</b>	<b>-0.241394</b>	<b>0.254234</b>	<b>-0.949496</b>	<b>0.3505</b>
X3	0.513507	0.246968	2.079246	0.0469

**Sumber : Diolah Penulis, 2019**

Adapun hipotesisnya yaitu sebagai berikut :

$H_{02}$  : Tingkat Inflasi secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

$H_{a2}$  : Tingkat Inflasi secara parsial berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan tabel 4.11, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai signifikansi variabel Tingkat Inflasi sebesar  $0,3505 > 0,05$  (taraf nyata signifikansi penelitian) dan  $t_{hitung} -0.949496 < t_{tabel} 2,048$ . Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak, yang artinya secara parsial Tingkat Inflasi tidak berpengaruh positif terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah.

### 3) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

**Tabel 4.12**

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.385474	0.746754	-4.533584	0.0001
X1	15.08834	1.314481	11.47855	0.0000
X2	-0.241394	0.254234	-0.949496	0.3505
<b>X3</b>	<b>0.513507</b>	<b>0.246968</b>	<b>2.079246</b>	<b>0.0469</b>

**Sumber : Diolah Penulis, 2019**

Adapun hipotesisnya yaitu sebagai berikut :

$H_{03}$  : Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

$H_{a3}$  : Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai signifikansi variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar  $0,0469 < 0,05$  (taraf nyata signifikansi penelitian) dan  $t_{hitung} 2,079246 > t_{tabel} 2,048$ . Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, yang artinya secara parsial Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah.

### 4.1.3 Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Secara Simultan Pada Kota Bandung Periode 2011-2018

#### 4.1.3.1 Uji F (Uji Simultan)

Uji f dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pengaruh semua variabel independen terhadap satu variabel dependen sebagaimana yang diformulasikan dalam satu model persamaan regresi linier berganda sudah tepat (Chandrarin, 2017:140). Hipotesis secara simultan dalam penelitian ini adalah :

$H_0$  : Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

$H_a$  : Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Adapun kriteria pengambilan keputusannya yaitu :

- $H_0$  ditolak jika probabilitas value  $< 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$
- $H_0$  tidak ditolak jika probabilitas value  $> 0,05$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$

**Tabel 4.13**

#### Uji F (Uji Simultan)

R-squared	0.869896	Mean dependent var	6.279688
Adjusted R-squared	0.855956	S.D. dependent var	2.069320
S.E. of regression	0.785372	Akaike info criterion	2.471150
Sum squared resid	17.27066	Schwarz criterion	2.654367
Log likelihood	-35.53840	Hannan-Quinn criter.	2.531881
<b>F-statistic</b>	<b>62.40398</b>	Durbin-Watson stat	1.109481
<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0.000000</b>		

Sumber : Diolah Penulis, 2019

Berdasarkan tabel 4.13, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai signifikansi model regresi (Prob F-Statistic) secara simultan sebesar 0,0000, nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yaitu  $0,0000 < 0,05$  dan  $F_{hitung} 62,40398 > F_{tabel} 2,93$ . Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya secara bersama-sama atau secara simultan variabel Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah.

#### 4.1.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada umumnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan  $R^2$  dari model regresi yang digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya (Ghozali, 2018:97). Berikut ini merupakan hasil pengujian koefisien determinasi yaitu :

**Tabel 4.14**

#### Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.869896	Mean dependent var	6.279688
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0.855956</b>	S.D. dependent var	2.069320
S.E. of regression	0.785372	Akaike info criterion	2.471150
Sum squared resid	17.27066	Schwarz criterion	2.654367
Log likelihood	-35.53840	Hannan-Quinn criter.	2.531881
F-statistic	62.40398	Durbin-Watson stat	1.109481
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Sumber : Diolah Penulis, 2019**

Berdasarkan tabel 4.14, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,85 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yaitu

Penerimaan Pajak Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independennya yaitu Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi dimana dalam penelitian ini adalah sebesar 85%, sedangkan sisanya sebesar 15% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar dari model penelitian ini.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018**

#### **4.2.1.1 Pendapatan Per Kapita Pada Kota Bandung Periode 2011-2018**

Pendapatan per kapita yang ada pada kota bandung menunjukkan rata-rata yang mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2011-2018. Akan tetapi kenaikan tersebut dapat dikatakan belum terlalu signifikan karena persentase angka kenaikan setiap tahunnya belum terlalu besar. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan jumlah produk domestik bruto yang berkembang setiap tahunnya tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk kota bandung yang setiap tahunnya semakin meningkat lebih tinggi, tetapi secara keseluruhan perkembangan produk domestik bruto pada kota bandung dapat dikategorikan baik terbukti dari peningkatan pendapatan per kapita setiap tahunnya.

Pendapatan per kapita atau PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi

suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (Susanti, 2007).

Nilai pendapatan per kapita yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa tingginya kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam mensejahterakan dan menunjang kegiatan perekonomian masyarakat sehingga menghasilkan pendapatan per kapita yang semakin meningkat setiap tahunnya serta menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah yang sudah cukup baik.

#### **4.2.1.2 Tingkat Inflasi Pada Kota Bandung Periode 2011-2018**

Tingkat inflasi yang ada pada Kota Bandung menunjukkan nilai rata-rata Tingkat Inflasi pada Kota Bandung periode 2011-2018 menunjukkan nilai yang bervariasi setiap tahunnya, karena kedudukannya yang hampir seimbang antara peningkatan dan penurunan nilainya, tetapi cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, peningkatan inflasi yang terjadi dapat dikatakan cukup signifikan karena jumlah kenaikannya yang lebih dari 3%.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap perubahan tingkat inflasi yang terjadi pada Kota Bandung. Contohnya seperti proses perputaran uang yang terjadi selama kurun waktu periode tersebut yang selalu berubah-ubah mengikuti pertumbuhan ekonomi, tingginya permintaan atas suatu barang yang tidak diimbangi dengan penawarannya juga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi peningkatan inflasi, biaya produksi juga berpengaruh terhadap tingkat inflasi karena apabila bahan baku dari

suatu barang mengalami kenaikan, maka otomatis harga jual yang ditentukan pun akan ikut mengalami kenaikan, serta nilai tukar atau kurs mata uang yang berubah-ubah setiap saat juga sangat mempengaruhi tingkat inflasi. Beberapa faktor tersebutlah yang menyebabkan inflasi yang terjadi pada Kota Bandung selalu berfluktuasi cukup signifikan dan cenderung meningkat selama periode 2011-2018. Secara keseluruhan perkembangan tingkat inflasi pada kota Bandung dapat dikategorikan kurang baik terbukti dari peningkatan inflasi setiap tahunnya.

Nilai rata-rata persentase tingkat inflasi yang tinggi menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi tingkat inflasi daerah seperti perputaran uang, tingginya permintaan, biaya produksi dan nilai tukar yang terjadi tergolong kurang baik serta menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah yang kurang baik dan belum maksimal karena seharusnya tingkat inflasi mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan nilai rata-rata persentase tingkat inflasi yang rendah menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi tingkat inflasi daerah seperti perputaran uang, tingginya permintaan, biaya produksi dan nilai tukar yang terjadi tergolong baik karena semakin rendah tingkat inflasi maka semakin berdampak baik bagi kegiatan perekonomian daerah serta menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah yang sudah cukup baik.

#### **4.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Pada Kota Bandung Periode 2011-2018**

Pertumbuhan ekonomi pada Kota Bandung menunjukkan angka yang berubah-ubah setiap tahunnya, walaupun pada beberapa tahun menunjukkan kenaikan tetapi jika di perhatikan memang perubahannya cenderung menurun. Dari

hal tersebut dapat kita lihat bahwa kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat dikatakan kurang baik karena belum dapat memaksimalkan kinerjanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada Kota Bandung. Hal tersebut berarti bahwa perkembangan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi daerah seperti produksi barang dan jasa serta kemampuan daya beli masyarakat belum dapat dilakukan secara maksimal, hal ini terbukti dari persentase laju pertumbuhan ekonomi pada Kota Bandung yang cenderung menurun pada periode 2011-2018.

Nilai rata-rata persentase laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi daerah seperti produksi barang dan jasa serta kemampuan daya beli masyarakat sudah cukup tinggi serta menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik. Sedangkan nilai rata-rata persentase laju pertumbuhan ekonomi yang rendah menunjukkan bahwa rendahnya perkembangan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi daerah seperti produksi barang dan jasa serta kemampuan daya beli masyarakat serta menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah yang kurang baik dan belum maksimal.

#### **4.2.1.4 Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018**

Penerimaan pajak daerah pada Kota Bandung memiliki rata-rata yang cenderung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2011-2018. Akan tetapi kenaikan tersebut dapat dikatakan belum terlalu signifikan karena

persentase angka kenaikan setiap tahunnya belum terlalu besar. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan jumlah penerimaan pajak daerah belum dapat mencapai nominal yang telah dianggarkan sebelumnya, hal itu disebabkan oleh banyaknya jenis pajak daerah yang masih terdapat kendala pada proses pelaksanaannya.

Contohnya seperti Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang memiliki selisih target dan potensi paling besar di antara sembilan jenis pajak yang ada, serta dari jenis pajak daerah lainnya yaitu Pajak Reklame yang belum dapat dioptimalkan dikarenakan banyaknya wajib pajak yang belum membayar kewajibannya sehingga merugikan penerimaan pajak daerah, tetapi walaupun begitu secara keseluruhan perkembangan penerimaan pajak daerah pada kota bandung cenderung mengalami peningkatan penerimaan pajak daerah dari segi nominal pada setiap tahunnya meskipun belum dapat mencapai target.

Nilai rata-rata persentase penerimaan pajak daerah yang tinggi menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi proses penerimaan pajak daerah seperti pemungutan pajak daerah serta kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak daerah sudah cukup tinggi serta menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik. Sedangkan nilai rata-rata persentase penerimaan pajak daerah yang rendah menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi proses penerimaan pajak daerah seperti pemungutan pajak daerah serta kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak daerah tergolong rendah serta menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah yang kurang baik sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

## **4.2.2 Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Secara Parsial pada Kota Bandung Periode 2011-2018**

### **4.2.2.1 Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel 4.10, menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang artinya Pendapatan Per Kapita berpengaruh positif terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah.

Dalam data statistik yang disajikan menunjukkan bahwa pendapatan per kapita yang menjadi sampel penelitian pada jangka waktu tahun 2011-2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata pendapatan masyarakat Kota Bandung sudah berada dalam kategori baik karena terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Menurut Hera Susanti, Moh Ikhsan dan Widyanti (2007:61) semakin maju suatu perekonomian ditunjukkan oleh semakin tingginya pendapatan perkapita penduduknya. Pendapatan per kapita menjadi salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pendapatan per kapita masyarakat pada suatu daerah menunjukkan semakin tinggi pendapatan masyarakatnya maka akan semakin tinggi pula daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membayar berbagai kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pajak daerah. Jika pendapatan per kapita suatu daerah meningkat berarti

kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkat. Dengan kata lain, potensi penerimaan pajak pada daerah tersebut juga semakin besar dan berdampak baik bagi pendapatan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pidelis Murib, Debby C. Rotinsulu, dan Krest D. Tolosang (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadya Fazriana Haniz dan Hadi Sasana (2013) juga menyatakan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suci Sukmawati (2018) juga menyatakan bahwa PDRB atau pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Sependapat dengan penelitian tersebut, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Puspita Suci Arianto (2014) menyatakan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

#### **4.2.2.2 Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel 4.11, menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,3505. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak, yang artinya secara parsial Tingkat Inflasi tidak berpengaruh positif terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah.

Dalam data statistik yang disajikan menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang menjadi sampel penelitian pada jangka waktu tahun 2011-2018 pada Kota Bandung menunjukkan angka yang berubah-ubah setiap tahunnya, walaupun pada beberapa tahun menunjukkan penurunan tetapi jika di perhatikan memang perubahannya

cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata inflasi pada Kota Bandung berada dalam kategori yang kurang baik karena selalu berfluktuasi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Sukirno (2015:15) Inflasi dapat diartikan sebagai sesuatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi mengurangi kemampuan membayar atau daya beli masyarakat dan cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Sebagian besar masyarakat terdiri dari pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi angka tingkat inflasi pada suatu daerah menunjukkan semakin meningkat perubahan harga-harga pada perekonomian masyarakatnya maka akan semakin rendah pula daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membayar berbagai kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pajak daerah. Jika tingkat inflasi pada suatu daerah meningkat berarti kemampuan daerah dalam membayar pajak akan menurun. Dengan kata lain, potensi penerimaan pajak pada daerah tersebut juga semakin mengecil dan berdampak buruk bagi pendapatan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Encep Herdiana Rachman Nalendra (2013) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh secara negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Nurmayasari (2010) dan Heru Kusmono (2011) dimana dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan

pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hidayati Sania, Eva Anggra Yunita, Ibnu Muttaqin (2018) juga menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Sependapat dengan penelitian tersebut, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Puspita Suci Arianto (2014) menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

#### **4.2.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel 4.12, menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0469. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, yang artinya secara parsial Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah.

Dalam data statistik yang disajikan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang menjadi sampel penelitian pada jangka waktu tahun 2011-2018 pada Kota Bandung menunjukkan angka yang berubah-ubah setiap tahunnya, walaupun pada beberapa tahun menunjukkan kenaikan tetapi jika di perhatikan memang perubahannya cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi pada Kota Bandung selalu ber fluktuasi. Tetapi walaupun begitu, penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan karena jumlahnya yang tidak terlalu besar dan masih dalam batas wajar proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah.

Menurut Sukirno (2015:9) Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai : perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi menerangkan

atau mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara. Dengan adanya suatu proses pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah maka akan meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan beberapa cara, dan salah satunya adalah dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atau *Rate of Economic Growth* adalah suatu angka dalam presentase yang memperlihatkan tinggi rendahnya atau cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam satu tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya (Murni, 2016:39).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat kemakmuran dan kemampuan pada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena beberapa faktor, contohnya yaitu faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan berdampak terhadap penambahan jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan akan semakin berkembang. Selain itu tenaga kerja yang semakin bertambah sebagai akibat dari perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan akan berdampak pada keterampilan yang semakin berkembang. Tanah dan kekayaan alam lainnya, sistem sosial dan sikap masyarakat. Faktor-faktor di atas mempengaruhi penerimaan pajak daerah melalui pertumbuhan ekonomi walaupun secara tidak langsung. Penerimaan pajak di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah faktor pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah meningkat berarti kemampuan daerah dalam membayar pajak juga

meningkat. Dengan kata lain, potensi penerimaan pajak pada daerah tersebut juga semakin besar dan berdampak baik bagi pendapatan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kanghua Zeng, Shan Li, Qian Li (2014) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap total penerimaan pajak dan struktur pajak di China pada tahun 2014. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abolfazl Yahyaabadi , Farzad Karimi, dan Nahid Abedini Najafabadi (2012) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap investigasi penerimaan pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Oktiya Damayanti Suhadak, Maria Goretti Wi, Endang Nirowati Pamungkas (2016) juga menyatakan bahwa *Economic Growth* dan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia. Sependapat dengan penelitian tersebut, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dian Triastuti, Dudi Pratomo (2016) juga menyatakan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

#### **4.2.3 Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Secara Simultan pada Kota Bandung Periode 2011-2018**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan ditampilkan pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung periode 2011-2018.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa jika Pendapatan Per Kapita meningkat, Tingkat Inflasi menurun, dan Pertumbuhan Ekonomi meningkat maka akan mampu meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kota Bandung periode 2011-2018. Dalam penelitian ini Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi saling menunjang satu sama lain sehingga berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota Bandung Periode 2011-2018, maka pada bagian akhir dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kota Bandung pada periode 2011-2018 memiliki pendapatan per kapita yang termasuk kedalam kategori baik, dimana pada setiap tahunnya jumlah pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Tingkat inflasi Kota Bandung pada periode 2011-2018 termasuk kedalam kategori kurang baik karena rata-rata persentasenya yang cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada periode 2011-2018 termasuk kedalam kategori kurang baik, karena rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kurun waktu tersebut cenderung mengalami penurunan tetapi meskipun begitu jumlah penurunannya tidak terlalu signifikan. Hal tersebut dikarenakan proses pertumbuhan ekonomi daerah belum dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Bandung. Penerimaan pajak daerah Kota Bandung pada periode 2011-2018 termasuk kedalam kategori kurang baik, karena dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat mencapai target. Meskipun begitu, jika dilihat dari jumlah penerimaan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

2. Secara parsial Pendapatan Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hasil ini mengandung arti bahwa semakin besar pendapatan per kapita masyarakat maka penerimaan pajak daerah akan semakin meningkat. Tingkat Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini disebabkan semakin meningkat tingkat inflasi yang terjadi maka menyebabkan semakin rendahnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hasil ini memiliki arti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, maka semakin besar penerimaan pajak daerah yang dapat diterima.
3. Hasil pengujian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini mampu mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. Pendapatan Per Kapita, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini hanya mampu mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah sebesar 85% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Bandung.

Untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan survei pajak yang dilakukan secara berkala dan efektif agar semua wajib pajak yang belum memiliki NPWP dapat terdata dan segera memilikinya supaya wajib pajak dapat membayar kewajibannya untuk membayar pajak. Upaya lainnya dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pajak baik secara internal maupun eksternal dan mengoptimalkan pendapatan pajak melalui program Pemerintah yaitu Program Penindakan dan Penertiban Pajak Daerah (P4D). Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk menurunkan tingkat inflasi adalah dengan menstabilkan harga kebutuhan bahan-bahan pokok dan menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran yang terjadi pada proses perekonomian serta mengurangi kegiatan impor barang dan lebih meningkatkan produksi barang lokal. Selain itu, Pemerintah harus dapat menaikkan daya beli masyarakat dengan cara pemberian modal bagi masyarakat yang memiliki usaha melalui program bantuan kredit agar dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita. Hal ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan dan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kota Bandung.

2. Bagi peneliti selanjutnya.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sampel dan menggunakan variabel lainnya selain yang tidak termasuk dalam penelitian ini atau menambahkan variabel lain yang mempunyai pengaruh lebih terhadap Penerimaan Pajak Daerah serta dapat menggunakan objek, tahun dan tempat penelitian lainnya selain pada Kota Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abolfazl Yahyaabadi , Farzad Karimi, dan Nahid Abedini Najafabadi. (2012), *An investigation on economic growth and tax: A case study of D8 countries from 1990 to 2009*.
- Arsyad, Lincolin. (2010), *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*. Yogyakarta : UPP STIM YKPM.
- Asri Hastuti. (2019), *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017*. *Skripsi. Program Sarjana STIE Ekuitas. Bandung*.
- Dian Triastuti, Dudi Pratomo. (2016), *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014)*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom*. Vol. 3 No. 1, hlm. 320-330.
- Dina Nurmayasari. (2005), *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*, *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*.
- Encep Herdiana Rachman Nalendra. (2013), *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2012)*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia.*, hlm. 1-13.
- Frangky. (2013), *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2012)*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia.*, hlm. 1-13.
- Ghozali, Imam (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Grahita Chandrarin. (2017), *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hariyuda, R. (2009), *Analisis pengaruh pertumbuhan penduduk, Pertumbuhan usaha, Pertumbuhan PDRB dan Tingkat inflasi terhadap penerimaun pajak 6L Daerah (studi kasus di kota kediri)*. *Skripsi. Program Sarjana Universitas brawijaya. Malang*.
- Heru Kusmono. (2011), *Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Indonesia*. *Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan*.
- Herwig Immervol. (2000), *The Impact of Inflation on Income Tax and Social Insurance Contributions in Europe*.

Hidayati Sania, Eva Anggra Yunita, Ibnu Muttaqin. (2018), Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Pancasakti*. Vol. 9 No. 2, hlm. 74-86.

<https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/11/16/127/laju-pertumbuhan-ekonomi-kota-bandung-tahun-2011-2017-persen-.html>, diakses pada 3 Oktober 2019

<http://www.koran-jakarta.com/pemkot-bandung-optimalisasi-penerimaan-pajak/>, diakses pada 19 September 2019.

<https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1060>, diakses pada 12 Januari 2020.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3976166/pajak-2017-tak-penuhi-target-begini-upaya-pemkot-bandung>, diakses pada 19 September 2019.

<https://republika.co.id/berita/koran/news-update/15/10/29/nwyr477-potensi-pajak-kota-bandung-belum-tergali-maksimal>, diakses pada 18 September 2019.

<https://www.ayobandung.com/read/2015/09/01/2328/sepertinya-tahun-ini-kota-bandung-tak-bisa-kejar-target-pajak>, diakses pada 22 September 2019.

<https://ppid.bandung.go.id/kb/informasi-publik/informasi-berkala-ppid-kota-bandung/laporan-keuangan/>, diakses pada 25 September 2019.

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>, diakses pada 9 September 2019.

Kanghua Zeng, Shan Li, Qian Lil. (2014), *The Impact of Economic Growth and Tax Reform on Tax Revenue and Structure: Evidence from China Experience*. *Modern Economy*, 2014, 4, 839-851.

Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad. (2000), Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM. Yogyakarta.

Mardiasmo. (2018), *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

Masrofi, Muhammad. (2004), Potensi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.

Murni, Asfia. (2016), *Ekonomika Makro Edisi Revisi*. Bandung : Refika Aditama.

Oktiya Damayanti Suhadak, Maria Goretti, Wi Endang Nirowati Pamungkas. (2016), Pengaruh Tingkat Inflasi, *Economic Growth*, dan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara-Negara Asia (Studi Pada World Bank Periode 2005-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 9 No. 1 2016. hlm 1-9.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

- Pidelis Murib, Debby C. Rotinsulu, Dan Krest D. Tolosang. (2016), Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 16 No. 01. hlm 839-851.
- Puspita Suci Arianto, Yazid Yud Padmono. (2014), Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 1. hlm 1-16.
- Resmi, Siti. (2017), *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2017), *Metode Penelitian untuk Bisnis Edisi 6, Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan.P. Marihot. (2012), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Suci Sukmawati. (2014), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Medan. *Skripsi. Program Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan*.
- Sugiyono. (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2015), *Makroekonomi. Edisi Ketiga*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Susanti, Hera. Moh Ikhsan dan Widyanti,. (2007), *Indikator-Indikator Makro ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.